

**SEJARAH MARGA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA MASA KEPEMIMPINAN
DEPATI NANGNING KAMALAJAYA (1926-1969)**

SKRIPSI

**OLEH
DELLY
NIM 352010094**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JULI 2014**

**SEJARAH MARGA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA MASA KEPEMIMPINAN
DEPATI NANGNING KAMALAJAYA (1926-1969)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan**

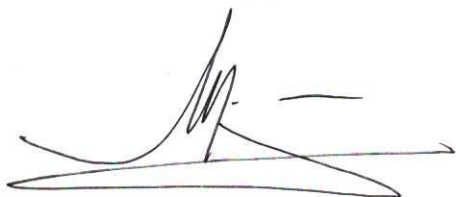
**Oleh
Delly
NIM 352010094**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Juli 2014**

Skripsi oleh Delly ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 14 Juli 2014

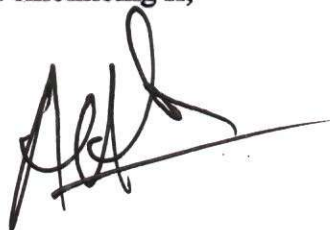
Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Drs. H. M. Alimansyur

Palembang, 14 Juli 2014

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Alfabri Rasyid, S.Pd.

Skripsi oleh Delly ini telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 14 Juli 2014

Dewan Penguji:



Drs. H. M. Alimansyur, Ketua



Alfabri Rasyid, S.Pd, Anggota



Apriana, M.Hum, Anggota

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,



Heryati, S.Pd., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan
FKIP UMP,



Drs. Syaifudin, M.Pd.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Tindakan memang tidak selamanya membawa kesuksesan tetapi tidak ada kesuksesan tanpa tindakan.*
- ❖ *Hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari pada hari ini.*

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta Bapak Dani dan Ibu Sumarni yang selalu kubanggakan yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan mengharapkan keberhasilanku.*
- ❖ *Kakak dan Adikku tersayang (Jailani, Darman, Nenik, dan Veti).*
- ❖ *Seseorang yang telah memberikan dukungan serta motivasi (Eko Wahyudi).*
- ❖ *Agamaku.*
- ❖ *Almamaterku.*

ABSTRAK

Delly. 2014. *Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing : (I) Drs. H. M. Alimansyur, (II) Alfabri Rasyid S. Pd

Kata kunci : Marga Pampangan, Kecamatan Pampangan.

Penelitian ini **dilatarbelakangi** keingintahuan penulis tentang *Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)*. **Permasalahan** (1) Bagaimana sejarah terbentuknya pemerintahan Marga Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, (2) Bagaimana sistem pemerintahan marga di Pampangan serta kendala-kendala pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969); (3) Bagaimana dampak kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat Marga Pampangan (1926-1969). Metode penelitian **historis**, jenis penelitian **deskriptif kualitatif** dan kajian pustaka: pendekatan ekonomi, geografi, politik dan sosial. **Kesimpulan**: (1) Sejarah terbentuknya Marga Pampangan dipelopori Depati Piden tahun 1890-1910, sebagai respon atas aspirasi masyarakat di 11 desa dalam wilayah Pampangan. Pembentukan Marga Pampangan di dorong oleh semakin bertambahnya pendudukan sehingga perlu dibentuk identitas wilayah otonomi dengan adat istiadatnya yang khas di Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2) Sistem pelaksanaan pemerintah Marga Pampangan pada kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya tahun 1926-1969, didasarkan kepada Undang-Undang Simbur Cahaya serta kendala-kendala pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya di Marga Pampangan diantara berikut: sumber daya manusia, politik (kesadaran tentang hak dan kewajiban) dan administrasi pemerintahan, soal pengelolaan keuangan, psikologi masyarakat dan dalam penentuan batas-batas tanah Marga Pampangan. (3) Dampak kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya telah mendorong kemajuan dalam beberapa bidang: pendidikan meningkatnya sarana sekolah; ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian dan perikanan, bidang agama dengan bertambahnya mushola; meningkatnya kegiatan ibadah serta bidang sosial budaya, masrakat masih teguh pada aturan adat Marga Pampangan. **Saran**: Kepada mahasiswa agar dapat memahami sejarah Marga, kepada program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang agar dapat menamba bahan bacaan sejarah, kepada pemerintah hendaknya segera membuat kebijakan untuk menyelamatkan asset-aset yang berharga dengan melestarikan budaya daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)*. Skripsi ini disusun sebagai salah-satu syarat akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Sarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Drs. H. M. Alimansyur, Pembimbing I selama penyusunan skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi serta memberikan arti sebuah perjuangan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Alfabri Rasyid, S.Pd, Pembimbing II selama penyusunan skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi serta memberikan arti sebuah perjuangan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih, yaitu kepada yang terhormat:

1. Drs. Syaifudin, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Heryati, S.Pd, M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Para dosen dan karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ayahanda tercinta Dani dan Ibunda tersayang Sumarni yang telah banyak berkorban dan senantiasa mengharap keberhasilan ku.
5. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah (HMPS Sejarah), teman-teman PPL di SMA Negeri 13 Palembang dan teman-teman KKN Tematik Posdaya Angkatan VI Posko 366 Desa Muara Emburung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
6. Seluruh teman-teman dekat penulis (Efri, Juniza, Lista, sejarah kelas B) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Demikian pula kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin Ya Robbal Alamin. Wassalam.

Palembang, Juli 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Pengertian: Eksistensi, Marga, Kabupaten	
1. Pengertian Eksistensi.....	13
2. Pengertian Marga	13
3. Pengertian Kabupaten.....	15
B. Tinjauan Kondisi Alamiah Daerah Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir	
1. Kondisi Alamiah Sumatera Selatan	16
2. Kondisi Alamiah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	17
C. Tinjauan Terhadap Sistem Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan	18

3. Kendala Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan	72
4. Kendala Dalam Bidang Psikologi Masyarakat	73
5. Kendala Dalam Batas Tanah Marga Pampangan	73
C. Dampak Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajay terhadap Kondisi Sosial, Pendidikan, Keamanan dan Ekonomi Masyarakat Pampangan (1926-1969)	74
1. Dampak Terhadap Kondisi Sosial	74
2. Dampak Terhadap Kondisi Pendidikan	75
3. Dampak Terhadap Pemerintahan.....	76
4. Dampak Terhadap Agama	77
5. Dampak Terhadap Keamanan dan Ketertiban	77
6. Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR RUJUKAN	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Keadaan Desa-Desa Di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	2
1.2 Nama-Nama Pasirah di Marga Pampangan 1890-1983	4
2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Marga	19
3.1 Tahap-Tahap Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

A. Gambar	Halaman
1. Depati Nangning Kamalajaya.....	84
2. Depati Nangning Bersama Keluarga	85
3. Depati Nangning Bersama Kepala Marga di Sumatera Selatan	85
4. Medali Depati Nangning Kamalajaya	86
5. Rumah Depati Nangning Kamalajaya	86
6. Kantor Marga Pampangan	87
7. Mushola Bangunan Depati Nangning Kamalajay	87
8. Sekolah Rakyat Marga Pampangan.....	88
9. Ahmad Nadjamuddi.....	89
10. Syahbudin.....	90
11. Yusuf.....	91
12. Perdi S.Pd.....	92
13. Sarbini S. Pd.....	93
14. Tuti	94
15. Mukti	95
B. Lampiran	
1. Persetujuan Skripsi.....	96
2. Surat Keputusan Pembimbing	97
3. Usul Judul Skripsi	98
4. Surat Undangan Simulasi Proposal	99
5. Daftar Hadir Simulasi Proposal	100
6. Halaman Pengesahan Proposal Penelitian	101
7. Laporan Kemajuan Bimbingan Skripsi	102
8. Surat Permohonan Riset.....	103
9. Surat Izin Riset	104
10. Surat Pertanggung Jawaban	105
11. Riwayat Hidup	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Pampangan yang menjadi fokus telaah dalam skripsi ini pada awalnya merupakan salah satu wilayah marga yang ada di Sumatera Selatan sedangkan pada masa sekarang merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kecamatan Pampangan pada awalnya membawahi 11 desa, namun karena mengalami pemekaran sekarang menjadi 21 desa adapun desa-desa di Kecamatan Pampangan sebagai berikut: (1) Bangsal, (2) Jermun, (3) Jungkal, (4) Kandis, (5) Keman, (6) Kemanbaru, (7) Kuro, (8) Menggeris, (9) Pulaubetung, (10) Pulaulayang, (11) Secondong, (12) Sepang, (13) Serdang, (14) Srimenang, (15) Tanjungkemang, (16) Tapus, (17) Ulakdepati, (18) Ulakkemangbaru, (19) Ulakkemang, (20) Ulakpianggu, (21) Pampangan (Profil Kecamatan Pampangan, 2014).

Secara geografis Desa Pampangan terletak dipinggiran jalan raya Kabupaten dan dilalui oleh sebuah sungai yang disebut Sungai Pampangan. Sungai ini bermuara dari Danau Lebak Deling (Kecamatan Pangkalan Lampam) menuju ke Muara Padang (MUBA). Luas Desa Pampangan berdasarkan data kependudukan kantor Kepala Desa Pampangan adalah 48,80 km², dengan jumlah penduduk 2.821 jiwa (31 Oktober 2013) dengan rincian sebagai berikut jumlah penduduk laki-laki 1.301 jiwa, perempuan 1.520 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 971 KK selengkapnya data-data

mengenai desa-desa di Kecamatan Pampangan terlampir (Profil Desa Pampangan, 2013).

Tabel 1.1 keadaan Desa-Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013

No	Desa	Luas	Jumlah Penduduk
1	Ulakkemang	51,02 km ²	2626
2	Sepang	32,40 km ²	1602
3	Keman	47,15 km ²	2187
4	Kandis	34,11 km ²	1666
5	Ulakdepati	36,50 km ²	1256
6	Pulaulayang	29,95 km ²	1131
7	Tapus	33,35 km ²	1673
8	Pulaubetung	38,97 km ²	1856
9	Bangsar	20,05 km ²	584
10	Kuro	22,47 km ²	888
11	Menggris	22,15 km ²	868
12	Pampangan	48,80 km ²	2821
13	Srimenang	21,50 km ²	810
14	Secondong	22,29 km ²	874
15	Jermun	20,17 km ²	797
16	Serdang	32,64 km ²	960
17	Jungkal	37,90 km ²	1320
18	Tanjungkemang	19,93 km ²	657
19	Ualakpianggu	28,11 km ²	1001
20	Ulakkemangbaru	31,54 km ²	1508
21	Kemanbaru	31,64 km ²	1376
Jumlah		662,39 Km²	82.463

(Kantor Kecamatan Pampangan tahun 2013)

Desa Pampangan terdiri dari 4 dusun (Dusun 1, 2, 3, dan 4) dengan jumlah RT 18, RW. 8. Dua pertiga wilayah Desa Pampangan teridir dari rawa-rawa dan lebak, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pedagang. Perbatasan wilayah Desa Pampangan berdasarkan profil Desa Pampangan sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulaubetung, sebelah timur berbatasa dengan Desa Srimenang dan Serdang, sebelah utara berbatasan dengan Desa

Pulaubetung dan Desa Srimenang (sebagian), dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulaubetung dan Serdang Demikian gambaran sekilas tentang keadaan geografis Pampangan.

Berdasarkan data-data di atas dusun merupakan bagian dari marga di Sumatera Selatan kemudian menjadi desa salah satunya yaitu Desa Pampangan yang terletak di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah administrasi pada masa Keresidenan Palembang. Menurut catatan resmi yang dibuat pihak kolonial Belanda yang diterbitkan tahun 1940, Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam lingkungan *Onder-Afdeeling* Komering Ilir terdiri dari 14 Marga, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Marga Kayuagung
2. Marga Pegagan Ulu Suku II
3. Marga Teloko
4. Marga Bengkulu
5. Marga Pegagan Ulu Suku I
6. Marga Masuji
7. Marga Danau
8. Marga Jejawi
9. Marga Sirah Pulau Padang
10. Marga Rambutan
11. Marga Pangkalan Lampam
12. Marga Keman

13. Marga Pampangan

14. Marga Tulung Selapan (Berlian, 2003:39-40).

Sebelum berdiri sebagai wilayah kecamatan, dahulu wilayah Pampangan berstatus sebagai salah satu wilayah marga di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem pemerintahan marga merupakan salah satu pemerintahan yang khas di Sumatera Selatan. Selama berstatus pemerintahan marga, Marga Pampangan tercatat telah dipimpin oleh beberapa Pasirah. Pasirah merupakan sebutan untuk pejabat kepala marga, salah seorang pasirah yang pernah menjabat di Marga Pampangan adalah Nangning Kamalajaya. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan di Pampangan, pada masa kepemimpinan Depati Nangning masyarakat Pampangan sangat sejahtera selain itu masyarakatnya juga sangat patuh terhadap peraturan adat terbukti, selama 38 tahun Depati Nangning Kamalajaya memerintah masyarakat Marga Pampangan sangat harmonis. Hal ini menarik minat penulis untuk mengangkat tema tentang masa pemerintahan Depati Nangning Kamalajaya untuk menjadi judul penelitian sekripsi penulis.

Tabel 1.2 Nama-Nama Pasirah di Marga Pampangan Tahun 1890-1983

1	Piden	1890-1910
2	Suud bin Piden	1910-1924
3	Jasen bin Suud	1924-1926
4	Nangning Kamalajaya	1926-1969
5	Amir hamza	1969-1983

(Propil Desa Pampangan, 1983).

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah Sumatera Selatan telah memiliki suatu kesatuan masyarakat hukum asli yang mempunyai asal usul khas dan berkembang dengan pola yang khas pula. “Kesatuan masyarakat hukum asli di Sumatera Selatan ini dikenal dengan sebutan marga” (Widjaja, 2001:25).

Sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan telah terbentuk jauh sebelum abad XVII, yaitu pada masa pemerintahan Sidoning Kenayan (1639-1650). “Istrinya bernama Ratu Sinuhun, berhasil menyusun dasar-dasar hukum untuk mengatur marga yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Simbur Cahaya”. Hanafiah (1996:455) menjelaskan seperti dalam kutipan di bawah:

Pada saat itu sudah ada model pemerintahan Marga. Semasa Pemerintahan Kesultanan Palembang tahun 1822 Masehi, pemerintahan asli yang dinamakan Marga, dijadikan pusat kegiatan bagi kesultanan dalam mendekati masyarakat dan akhirnya menguasai masing-masing kelompok rakyat yang bersangkutan terutama diwilayah-wilayah aliran sungai yang mudah didatangi perahu-perahu atau sampan-sampan yang dinamakan *pencelang*.

Berdasarkan kutipan di atas jelas bahwa sistem pemerintahan marga sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Struktur pemerintahan Kesultanan Palembang diterapkan dengan mengidentifikasi wilayah seperti *kepungutan* dan *sindang*. Sebagaimana dijelaskan oleh Berlian (1996:445) seperti dalam kutipan di bawah ini:

Kepungutan merupakan daerah yang langsung berada dibawah perintah Sultan. Sedangkan sindang adalah wilayah perbatasan yang penduduknya tidak dibebani dengan pajak-pajak. Rakyat dipandang sebagai sekutu dan hanya dikenakan cukai. Selain itu ada pula daerah yang disebut *sikap*. sikap merupakan suatu daerah khusus berupa dusun

atau kumpulan dusun yang dilepaskan dari marga, dipimpin oleh pamong sultan, yang disebut dengan *jenang* dan *raban*.

Struktur kewilayahan marga ini terus berlangsung dan tetap bertahan hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Selatan. Melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983 Nomor 142/KPTS/III1983 yang menentukan bahwa “Dusun sebagai bagian dari Marga di Sumatera Selatan dibentuk menjadi desa sebagai mana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979” (Berlian, 2003:134). Sedangkan Widjaya (2001:19) menjelaskan seperti dalam kutipan di bawah ini:

Adapun desa baru diadakan tahun 1979 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat setempat. Sistem ini berasal dari Jawa, sewaktu pemerintahan marga, desa disebut/disamakan dengan dusun (di Palembang) dan merupakan bagian dari marga (subsistem) dan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum disamping itu desa atau dusun tidak memiliki asal usul.

Pemerintahan marga yang merupakan ciri khas Sumatera Selatan ini berasal dari Sumatera Selatan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu pemerintahan marga terdiri dari Dewan Marga dan pasirah atau kepala marga. Baik anggota Dewan Marga maupun pasirah atau kepala marga lainnya, semuanya dipilih langsung oleh warga marga yang berhak memilih. Pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya pemerintahan Marga Pampangan juga dipilih langsung oleh warga yang berhak memilih.

Penelitian tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelumnya pernah diteliti oleh Lastri tahun 2012 dari Universitas Muhammadiyah Palembang Pogram Studi

Pendidikan Sejarah yang berjudul *Perkembangan Kecamatan Pangkalan Lampam dari Sistem Pemerintahan Marga ke Sistem Pemerintahan Desa Tahun 1974- 1984 (Suatu Tinjauan Historis)* dan Mepriyanti Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang yang berjudul *Adat Istiadat Perkawinan di Desa Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Tinjau Dari Segi Antropologi*.

Kesimpulan Lastri yang pertama adalah: Sistem pemerintahan di Pangkalan Lampam merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan adat dalam menjalankan pemerintahan, Pasirah sebagai kepala marga dibantu oleh juru tulis marga, kerio atau kepala dusun, penghulu/khatib dan dewan marga sebagai pengawas dari pelaksanaan pemerintahan, kedua: setelah pemerintahan marga dihapuskan dan diganti oleh pemerintahan desa, ketiga: terjadi perubahan-perubahan dalam pemerintahan seperti perubahan fungsi dan struktur pemerintahan.

Untuk meneliti lebih lanjut dari uraian di atas, penulis tertarik tentang *Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)*. Pada dasarnya penulis ingin mengembangkan penelitian yang pernah dilakukan Lastri dan Mepriyanti yang berjudul disebutkan di atas.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pemerintahan Marga Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

2. Bagaimana sistem pelaksanaan pemerintahan marga di Pampangan serta kendala-kendala yang timbul pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969) ?
3. Bagaimana dampak kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat Marga Pampangan (1926-1969) ?

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas lebih jelas dan terarah maka penulis membatasi permasalahan pada aspek temporal yaitu antara tahun 1926-1969. Tahun 1926 adalah pada masa Depati Nangning Kamalajaya diangkat menjadi pasirah di Desa Bangsal dan tahun 1969 Depati Nangning meninggal dunia sebagai tahun akhir masa pemerintahannya. Sedangkan aspek spatial adalah meliputi wilayah Ogan Komering Ilir dan khususnya Kecamatan Pampangan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sejarah terbentuknya Marga Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Sistem pelaksanaan marga di Pampangan Serta Kendala-kendala yang timbul pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)
3. Dampak kepemimpiniana Depati Nangning Kamalajaya terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat Marga Pampangan (1926-1969)

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejarah lokal dalam menggali sejarah masa lampau sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap khasanah sejarah Nasional. Disamping itu

diadakanya penelitian ini dapat mengetahui sistem pemerintahan marga dan pelaksanaanya, agar dijadikan sumber bacaan. Penelitian ini juga akan menjadi sumbangan ilmiah sejarah pemerintahan marga Pampangan dan dapat dijadikan bahan dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Pampangan.

F. Definisi Istilah

Sesuai dengan judul yaitu Eksistensi Marga Pampangan kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969). Maka penulis dapat menguraikan defenisi istilah yang ada dalam tulisan sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia (1988) sebagai berikut:

Daerah : Permukiman yang tertutup oleh perairan

Depati : Gelar Pasirah, bertindak sebagai raja kecil dipedalaman, kepala-kepala rakyat yang bebas dari pajak (*Vryheren*). Mereka tidak mempunyaai kewajibn membayar upeti kepada Sultan Palembang. Hanya dibelakang hari sebagai tanda ada hubungan dengan Sultan, diadakan *timbang tukon*. Barang-barang dari Palembang seperti Garam, Kain dan lain-lain dikirim Sultan ke pedalaman dengan harga tertentu. Nanti barang-barang itu diganti dengan barang-barang pedalaman keperluan kota, misalnya kapas, beras, dammar dan sebagainya

Exsistensi : Cara keberadaan

- Geografis* : Suatu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna serta hasil yang diperoleh dari bumi.
- Intelektual* : Cerdas, berakal, dan berfikir tinggi
- Ideologis* : Berkenaan dengan ideologis
- Identik* : Sesuai, benar, mirip
- Iliran* : Secara administrasi dan budaya merujuk pada kota Palembang bagian Ilir atau orang-orang iliran masyarakat kota Palembang
- Kolonialis* : Orang atau Negara yang menganut paham atau mempraktekan Kolonialisme atau penjajahan.
- Kepungutan* : Dipungut artinya dilindungi, daerah yang langsung dilindungi oleh Sultan, orang pedalaman Palembang yang langsung dibawah kekuasaan Sultan Palembang. Mereka dikenakan sebagai bentuk pajak
- Konflik* : Pertentangan, percekocokan
- Kidul* : Arah selatan ajahan
- Keresidenan* : Daerah yg dikepalai oleh residenan
- Lebak* : Kawah yang perairannya berasal dari air sungai

- Marga* : Gabungan beberapa dusun, desa. Secara administrasi merupakan wilayah terendah dalam Keresidenan Palembang
- Onder Afdeeling* : Daerah setingkat Kabupaten
- Pencelang* : Perahu/sampan
- Pasirah* : Kepala Pemimpin Marga
- Polarisa* : Hal atau sifat yang memperhatikan dua sifat yang berlawanan
- Palembang* : Ibu kota Sumatera Selatan
- Pribumi* : Masyarakat asli yang memduduki suatu daerah tersebut
yang terjadi terus -menerus atau musiman akibat drainas yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis
- Rawa- rawa* : Lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus - menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.
- Ritualisasi* : Orang yang ritual ataupun ataupun suatu acara adat
- Sindang* : Wilayah pedalaman paling ujung atau pinggir.
Penduduknyatidak membayar pajak (sindang mardika) namun mengakui kekuasaan sultan di ibukota
- Subsistem* : Komponen atau bagian dari suatu sistem, subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak.

Simbur cahaya : Undang-undang hukum adat

Tipologis : Ilmu watak bagaian manusia dengan golongan-golongan
Menurut corak watak masing- masing

Uluan : Secara administrasidan budaya merujuk pada daerah
diluar kota Palembang, pedalaman Palembang atau orang
orang uluan, masyarakat pendatang kota Palembang yang
berasal dari daerah uluan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksistensi, Marga dan Kabupaten

1. Pengertian Eksistensi

Pengertian eksistensi adalah keberadaan, adanya, kenyataannya (Marhijanto, 1995:178). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1991:253), eksistensi adalah adanya keberadaan: partai-partai yang memang tidak dapat dipertahankan lagi dan dipersilahkan untuk mundur dari percaturan politik. Eksistensi adalah “adanya kehidupan, misalnya partai-partai yang tidak bisa dipertahankan lagi, dipersilahkan mundur dari percaturan politik” (Poerwadarminta. 1976:267).

Sedangkan menurut Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988:221) Eksistensi adalah adanya keberadaan, partai-partai yang memang tidak dapat dipertahankan lagi, dipersilahkan mundur dari percaturan politik.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan eksistensi dalam penelitian ini adalah keberadaan, yaitu keberadaan suatu wilayah, khususnya Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

2. Pengertian Marga

Marga adalah sistem pemerintahan asli masyarakat uluan Sumatera Selatan, bukan sistem yang dibentuk oleh Kesultanan Palembang atau Pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Ismail (2004:14) istilah “marga sebagai nama dari kesatuan

masyarakat hukum yang berazaskan teritorial dan merupakan persekutuan daerah ini diketahui oleh para pengamat budaya Sumatera Selatan, berasal dari piagam-piagam Sultan Palembang”.

Sedangkan menurut Silitonga (2008:1) marga adalah “kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah *patrilineal* Sistem kekerabatan *patrilineal* menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki laki, orang Batak merasa hidupnya lengkap jika telah memiliki anak laki laki yang meneruskan marganya”.

Menurut (Depdikbud. 1994:3), marga adalah “bagian daerah atau sekumpulan dusun yang agak luas”. Pembarap adalah kepala dusun yang menempati pasirah, jika pasirah pergi ia mewakili pasirah (wakil pasirah). Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1991:630), marga adalah kelompok kekerabatan yang *eksogam* dan *unilinear*, baik secara *matrilinear* (garis keturunan ibu) maupun *patrilinear* (garis keturunan ayah). Bagian dari (sekumpulan dusun) yang agak luas (di Sumatera Selatan).

Dari pengertian marga yang ada di Sumatera Selatan dan istilah marga di Batak di atas berasal dari pengertian yang sama dan kebudayaan yang sama. Marga di Sumatera Selatan telah dipakai dan disebar luaskan pada saat Kerajaan Sriwijaya berkembang. Pada saat itulah marga dipakai sebagai nama dan sistem pemerintahan yang berlaku didaerah uluan Sumatera Selatan (Ismail. 2004:17).

Menurut Pasal 1 Tentang Aturan Marga yang menyatakan “di dalam suatu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintah atas segala hal yang berhubungan

dengan marganya sedangkan pesirah dipilih oleh orang banyak, namun raja yang mengangkat serta memberi nama atau gelar” (M.Hens. 1999:71).

Dalam beberapa batasan yang dikemukakan para ahli di atas tampak bahwa dalam mendefinisikan marga, para ahli menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan geneologis (rumpun keluarga/keturunan) maupun pendekatan territorial. Namun untuk daerah Sumatera Selatan, Marga lebih cenderung menunjuk kepada rumpun keluarga (geneologis) khususnya melalui pendekatan bahasa.

3. Pengertian Kabupaten

Kabupaten adalah “daerah yang dikepalai oleh bupati yang setingkat dengan kota madya, dan merupakan bagian langsung dari provinsi dan terdiri atas beberapa kecamatan” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1991:426).

Kabupaten adalah daerah yang dikepalai oleh bupati, dan kantor (rumah) bupati (Poerwadarminta. 1976:429). Sedangkan menurut kamus karangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988:373), kabupaten adalah daerah yang dikepalai oleh bupati (daerah ini setingkat dengan kota madya, merupakan bagian langsung dari provinsi dan terdiri atas beberapa kecamatan), kantor tempat kerja bupati, rumah tempat tinggal bupati.

Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kabupaten dalam penelitian ini adalah suatu daerah yang dikepalai oleh seorang bupati yang wilayah kabupaten ini bagian dari wilayah provinsi, dan wilayah dari kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kecamatan. Dalam penelitian ini wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu wilayah dari Provinsi

Sumatera Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri dari beberapa kecamatan yang salah satunya Kecamatan Pampangan.

B. Tinjauan Kondisi Alamiah Daerah Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ilir

1. Kondisi Alamiah Sumatera Selatan

Daerah Sumatera Selatan secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, yang meliputi daerah dengan batas-batas administratif, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Lampung, sebelah barat dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Pramudyanto Palembang merupakan salah satu Kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2°52 Lintang Selatan dan 104°37 sampai 52 Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut (Diana. 2012:10).

Ditinjau dari letak astronomis, wilayah Provinsi Sumatera Selatan menempati posisi antara titik 1°- 4° Lintang Selatan (LS) dan antara 102°,23-108°,41 Bujur Timur (BT) (Rasyid. 2010:1).

Secara topografis, Palembang adalah suatu kota waterfront, yang menghadap ke air dengan anak-anak sungai yang besar dan kecil memotong tepiannya sehingga membentuk sebuah laguna. Keadaan permukaan tanah yang luas didaerah ini didominasi oleh rawa-rawa. Oleh karena itu pemukiman penduduk sepanjang tepian Sungai Musi dipenuhi oleh rumah-rumah rakit dari bambu dan kayu terapung serta rumah tiang kayu (Santun. 2011:4).

Berdasarkan kondisi geologi Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Di bagian selatan kota, batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir yang kedap air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung yang tembus air hingga kedap air.

Dari kondisi hidrologi, menurut Ratna dalam Diana (2012:15) Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut:

Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter, Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter (Diana. 2012:15).

Menurut kutipan di atas wilayah Sumatera Selatan bagian Palembang merupakan daerah yang dikelilingi oleh banyak sungai sehingga masyarakat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang menyebar sampai ke seluruh wilayah Palembang kemudian berdiam disuatu tempat membuat suatu pemukiman yang pada akhirnya berkembang menjadi dusun-dusun salah satunya, yaitu dusun Pampangan yang kemudian dikenal dengan Marga Pampangan.

2. Kondisi Alamiah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak antara 104o,20' sampai 106o,00' Bujur Timur (BT) dan 2o,30' sampai 4o15' Lintang Selatan (LS). Secara administratif wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa.

Luas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 19.023,47 km² dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2007:1).

Pampangan adalah nama sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 21 desa yaitu Desa Pampangan, Bangsal, Jermun, Jungkal, Kandis, Keman, Kemanbaru, Kuro, Menggeria, Pulaubetung, Secondong, Sepang, Serdang, Srimenang, Tanjungkemang, Tapus, Ulakdepati, Ulakkemang dan Ulakpianggu (Dokumentasi Kecamatan Pampangan. 2013).

C. Tinjauan Terhadap Sistem Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan

Sistem pemerintahan marga merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan adat. "sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pemerintahan marga merupakan pemerintahan yang terendah di bawah asisten demang. Secara substansial struktur pemerintahan marga tidak berubah hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979" (Widjaja, 2001:5).

Kepala marga disebut dengan pasirah, sebagai penyelenggara urusan rumah tangga marga dan sebagai wakil pemerintah pusat. Karena pasirah adalah kepala marga sekaligus kepala adat wilayah pemerintahan terendah di wilayah Republik

Indonesia. Sebagai pemerintah terendah maka pasirah melaksanakan semua peraturan dan instruksi dari atasan baik pemerintah pusat Dati I, tingkat II maupun atasan langsung yaitu camat. Tugas pasirah tersebut antara lain: pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintah pusat, membantu menarik pajak, masalah urusan agama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Yusuf, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Dewan marga atau disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Marga, tugas pokoknya adalah membuat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan pemerintah marga dan adat-istiadat yang berlaku dalam marga serta mengawasi pelaksanaan dari peraturan itu oleh pasirah dan perangkat-perangkatnya. Dewan marga tidak turut mencampuri pelaksanaan pemerintahan marga tetapi hanya mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Juru tulis marga merupakan sekretaris pasirah yang tugasnya mengatur ketatausahaan, administrasi keuangan marga serta membuat konsep nilai marga, juru tulis marga ini di bantu oleh beberapa pegawai administrasi marga.

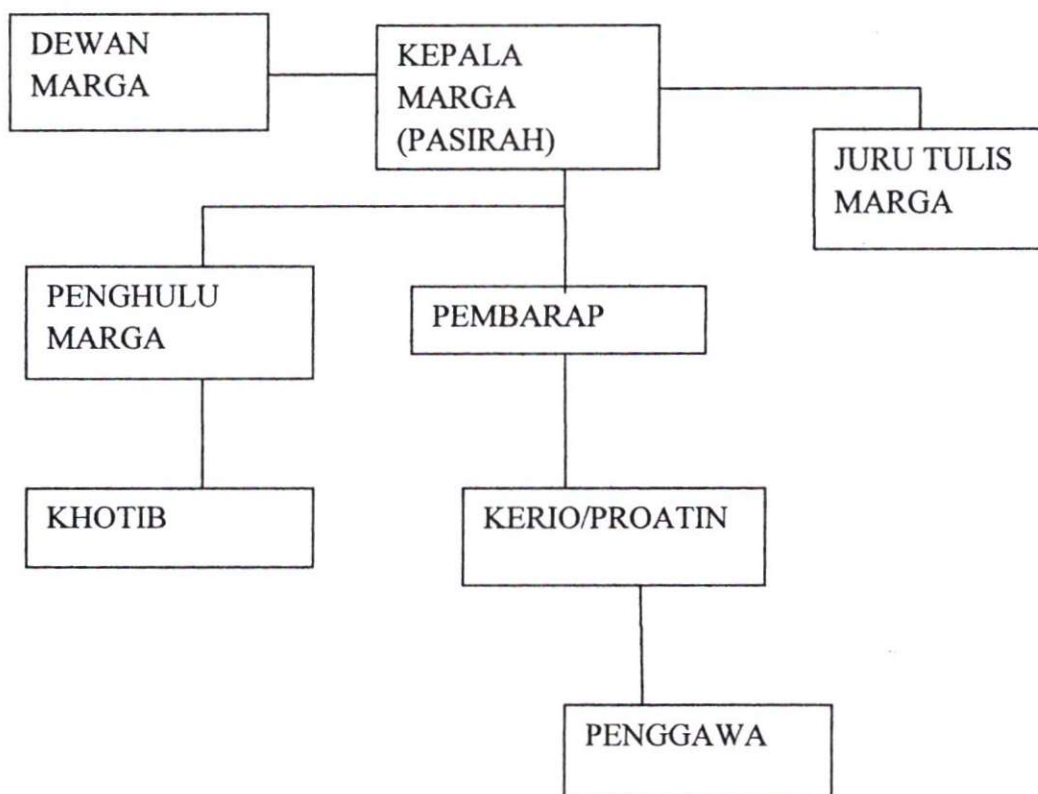
Kerio adalah seorang kepala dusun yang merupakan bawahan dari pasirah. Kerio merupakan perpanjangan tangan dari pasirah, sehingga seorang kerio juga berfungsi sebagai kepala adat tingkat dusun. Wilayah dusun terbagi dalam beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang yang dinamakan penggawa sebagai kepala kampung. Penggawa ini yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Yusuf, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Penghulu dan khatib bertugas sebagai pembantu pasirah dalam urusan agama. Penghulu mengawasi urusan agama pada tingkat marga, sedangkan khatib mengawasi agama dalam tingkat dusun-dusun. Penghulu dan khatib diangkat oleh

Bupati Daerah Tingkat II atas usul dari pasirah. Penghulu dan khatib mengurus segala sesuatu yang menyangkut kegiatan agama (Agama Islam) seperti pengurusan penguburan jenazah, penerima dan pembagian zakat, pencatat talak, cerai dan nikah, pembagian waris, pembawa do'a dan segala urusan pemeliharaan masjid dan langgar.

Pemilihan pasirah diseluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan khususnya daerah Marga Pampangan dilakukan delapan tahun sekali, dengan sistem pemilihan pada awal pemerintahan marga menggunakan sistem pemilihan *cumpuk*. Dalam sistem *cumpuk*, beberapa kontestan (calon) menempatkan diri berjajar ditanah lapang membelakangi kelompok pemilih. Selanjutnya, dipanggil mata pilih yaitu rakyat satu persatu untuk menentuoan calon pilihanya. Mata pilih, setelah dipanggil namanya, satu persatu duduk dibelakang calon yang di senangi. Setelah dilakukan penghitungan, siapapemilihnya iebih banyak maka dialah yang dinyatakan menang. Namun seiring dengan perkembangan zaman pemilihan pasirah dilakukan dengan menggunakan kotak suara seperti pemilihan umum sekarang (Yusuf, *wawancara*, 20 Maret 2014)

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN MARGA



Sistem pelaksanaan pemerintah Marga Pampangan dilaksanakan pada kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya tahun 1926-1969, didasarkan kepada Undang-Undang Simbur Cahaya, secara struktural adalah sebagai berikut *Dewan Marga* sebagai *pasirah* pemegang keputusan tertinggi (legislatif), *depati* sebagai kepala marga (eksekutif), *pembarap* sebagai kepala desa ibu kota marga, *krio-krio* atau kepala desa disebut *peggawa* sebagai kepala desa, dibawah pasirah terdapat khatib yang mengurus bidang agama, di desa dan dipegang oleh *penghulu*, penduduk di jalankan secara otonomi yang dibangun dari dana khas marga yang diperoleh dari pendapatan asli marga (Arsip Nadjammudin)

Dari gambar dapat dilihat struktur pemerintahan marga terdiri dari pasirah/kepala marga, dewan marga, juru tulis marga, kerio, penggawa dan khatib, baik anggota dewan marga maupun pasirah/kepala marga dan yang lainnya, semua dipilih langsung oleh warga marga yang berhak memilih. Hal ini berlaku terhadap Marga Pampangan sebagai salah satu Marga yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Biografi Depati Nangning Kamalajaya

Nangning adalah anak dari bapak Zam Zam yang lahir di Desa Bangsal pada tahun 1905 dan mempunyai istri yang bernama Hazah binti Andung kemudian dianugerahi sembilan anak adapun anak yang pertama yaitu Rusdiana binti Nangning, Isa binti Nangning, Basyuni binti Nangning, Ahmad Najamuddin bin Nangning, Tabroni bin Nangning, Sumarni binti Nangning, Sulaiman binti Nangning, Yasmin bin Nangning, dan Baharudin bin Nangning. Semasa hidupnya beliau diangkat sebagai depati atau pasirah kepala marga dengan mendapat gelar Pangeran. Berdasarkan basluit yang ada dibawah ini akan penulis uraikan secara singkat riwayat hidup Pangeran Nangning Kamalajaya:

1. Dari tanggal 2 Februari 1926 sampai dengan Mei 1928 diangkat sebagai proatin Dusun Kuro Marga Pampangan, oleh Controleur Komering Ilir, dengan Bersluit tanggal 2 Februari 1926 No. 15.
2. Dari Mei 1928 sampai dengan 10 Oktober 1928 diangkat sebagai Pasirah Marga Pampangan, oleh Residen Palembang, dengan bersluit tanggal 10 Mei 1928 No. 420.

3. Dari tanggal 10 Oktober 1928 sampai dengan 8 Februari 1947 diangkat sebagai Pasirah Marga Pampangan, oleh Residen Palembang, dengan bersluit tanggal 10 Desember 1928 No.882.
4. Dari tanggal 8 Februari 1947 sampai dengan 1 Juni 1954, terpilih/diangkat sebagai Pasirah Marga Pampangan, oleh Residen Palembang dengan bersluit tanggal 8 Februari 1947 No.20.
5. Dari tanggal 1 Juni 1954 sampai dengan tahun 1959, terpilih/diangkat sebagai Pasirah Marga Pampangan, oleh Residen Palembang dengan bersluit tanggal 1 Juni 1954 No. 192/Res.
6. Pada kenyataanya setelah habis masa jabatan tahun 1959, tanpa adanya pemilihan ulang yang bersangkutan tetap memegang jabatan Pasirah Marga Pampangan atas permintaan warga hingga bulan Agustus 1969, kepemimpinan pasirah nangning terhenti karena yang bersangkutan meninggal pada tahun 1969 (Arsip pribadi Nadjamuddin).

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Depati Nangning Kamalajaya, Marga Pampangan dipimpin sementara oleh seorang Dewan Marga Pampangan yaitu Jahri Ar-rahman beliau hanya beberapa bulan saja memerintah Marga Pampangan, kemudian Marga Pampangan mengadakan pemilihan depati untuk memerintah Marga Pampangan pada saat itu terpilihlah menantu dari Nangning Kamalajaya yaitu H. Amir Hamza yang memerintah dari tahun 1969-1983 berakhirnya masa pemerintahan Amir Hamza ini dikarenakan keluarnya Undang-Undang yang mengubah sistem pemerintahan marga ke sistem pemerintahan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode

Metode mengandung arti sebagai “suatu cara atau jalan untuk mengadakan suatu penelitian dan mencapai suatu tujuan atau cara mengajar (Kartodidjo, 1993:31). Menurut Abdurrahman, (1999:35) bahwa metode adalah “cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:191) bahwa metode adalah “suatu cara untuk berbuat sesuatu keteraturan dalam berbuat, berencana dan lain-lain”.

Dengan demikian pengertian metode mengandung arti sebagai cara dalam membuat suatu perencanaan penelitian untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian historis, yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam arti sejarah metode ini hendaknya diartikan lebih luas, tidak hanya mengenai analisis kritik saja, melainkan juga meliputi usaha sintesa pada data sejarah yang dapat dipercaya“ (Koenjoroningrat, 1997:16).

Menurut Hugiono (1987:16), *metode historis* adalah “suatu cara untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi untuk meningkatkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat”.

Untuk mengumpulkan data-data penelitian penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan , yaitu “penelitian yang diadakan

diruang perpustakaan, dimana penelitian mendapatkan data dan informasi tentang objek penelitian melalui buku-buku atau data *audio visual* lainnya” (Atar, 1993:8). Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi dan menentukan langkah-langkah penelitian, sehingga akan diperoleh literature yang sesuai ruang lingkup penelitian, berupa data primer atau skunder.

1. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik berasal dari kata *heuriskein* yang bearti menemukan. Pada langkah pertama ini penulis mengumpulkan data atau sumber berupa buku-buku, internet, sumber-sumber yang berhubungan dengan judul skripsi dan melakukan wawancara atau dengan cara lainnya.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Sumber-sumber yang telah di dapatkan, diseleksi sesuai dengan yang di butuhkan. Sumber-sumber sejarah yang berwujud benda, berupa tulisan (dokumen), arsip dan lainnya serta sumber lisan seperti hasil wawancara, maka kritik sumber banyak di tujukan terutama mengenai sumber tertulis.

Cara mengkeritik sumber dengan “melihat tulisannya atau ketikannya, tinta, kertas, membandingkan isi buku pengarang yang satu dengan isi buku pengarang yang lainnya dan lain-lain” (Sihombing, 2010:5). Krtik sumber dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kritik Ekstern

Kritik sumber ekstern adalah penelitian asli tidaknya suatu dokumen, dan apakah sumber yang diperoleh tersebut otentik, artinya bukan sumber-sumber sejarah yang ragu, sehingga relevan dengan penelitian. Setelah melakukan penelitian

terhadap data-data yang penulis peroleh maka dapat diketahui bahwa data yang penulis peroleh adalah benar-benar asli atau otentik yaitu antara lain berupa data-data seperti dalam catatan-catatan dari Nadjamuddin tentang sistem pemerintahan Marga Pampangan.

b. Kritik Intern

Setelah diadakan kritik intern dan ternyata sumber yang diperoleh secara ekstern dapat diakui sebagai sumber yang otentik, asli dan keutuhannya terjamin, maka harus diuji atau dibuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber itu memang dapat dipercaya. Kritik intern yang dilakukan oleh penulis adalah yang berkaitan dengan sumber yang diperoleh melalui hasil wawancara dan buku-buku yang menyangkut tentang pemerintahan marga.

3. Penafsiran (Interprestasi) sumber

pada langkah ini penulis berusaha menghubungkan antara data satu dengan data-data lain yang telah penulis peroleh kemudian diberi penafsiran dan dirangkaikan menjadi satu sehingga mengandung arti, guna membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Sebagai tahap akhir penulisan ini, penulis dalam penelitian sejarah yaitu menuangkan semua hasil penelitian ke dalam suatu tulisan atau laporan hasil penelitian. Tahap historiografi sangat penting yaitu mewujudkan suatu penelitian yang didukung oleh teori dan metodologi penulisan. "penulis berusaha untuk menyusun dan menyajikan ke dalam bentuk sejarah sebagai kisah sehingga

berbentuk tulisan yang utuh dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai fakta yang diperoleh” (Sihombing, 2010:5).

Menurut Abdurrahman, (1999:72) ada empat tahap kegiatan sehubungan dengan penelitian sejarah, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan tercetak, tertulis atau lisan yang relevan,
- b. Menyingkirkan bahan yang tidak otentik,
- c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik,
- d. Menyusun kesaksian yang dapat dipercaya untuk dijadikan cerita yang berarti mengenai tulisan.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat bergantung pada pendekatan yaitu dari segi mana penelitian memandangnya, dimensi yang diperhatikan dan unsur-unsur yang harus diungkapkan. “hal ini disebabkan karena menghadapi gejala historis yang serba kompleks sifatnya. Setiap penggambaran atau deskripsikan menurut pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang diperlukan” (Kartodirdjo, 1993:4).

Menurut Kartodirdjo (1993:1) “pendekatan sangat penting agar mampu memberikan penjelasan untuk membatasi pengungkapan terjadinya suatu atau hanya mengurangi kejadian suatu peristiwa. Dalam hal ini pendekatan tersebut dapat merekonstruksikan peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang yang berhubungan dengan permasalahan”.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969). Penulis menggunakan pendekatan multidisiplin dari ilmu sosial yaitu:

a. Pendekatan ilmu Geografi

Pendekatan ilmu geografi adalah “pendekatan yang mencakup bidang kewilayahan, seperti letak, lokasi, kondisi alam dan wilayah yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia” (Kartodirdjo, 1993:5). Pendekatan ini digunakan untuk melihat suatu wilayah dan keadaan alam dimana suatu peristiwa terjadi. Pendekatan ini menyoroti tempat atau daerah-daerah di Ogan Komering Ilir yang termasuk dalam Marga Pampangan.

b. Pendekatan Ilmu Politik

Pendekatan politik merupakan “suatu pendekatan yang menekankan pada aspek-aspek kekuasaan, jenis kepemimpinan dan sistem pemerintahan suatu wilayah” (Koenjorodiningrat, 1993:15). Pendekatan ilmu politik mayoritas tentang kekuasaan, jenis kepemimpinan, hirarki (jenjang/susunan) sosial dan pertentangan kekuasaan didalam masyarakat dan pemerintahan. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat terjadinya konflik didalam masyarakat dalam masing-masing penduduk, pada saat pemilihan Kepala Desa, pelayanan aparat desa, yang berdampak pada kehidupan masyarakat setelah berlakunya pemerintahan desa di Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Pendekatan Ilmu Ekonomi

Kartodirdjo (2010:20), menyatakan bahwa pendekatan ekonomi adalah “suatu upaya untuk mengetahui masalah atau perekonomian suatu Daerah atau Negara” pendekatan Ilmu Ekonomi bertujuan menyoroti keadaan ekonomi Marga Pampangan dari hasil pertanian seperti beras, karet, sayuran, umbi-umbian, hewan ternak dan lain-lain sampai fungsi kalangan sebagai tempat transaksi jual beli barang. Dengan pendekatan ini penulis ingin mengetahui dari mana sumber ekonomi pemerintahan marga serta bagaimana cara pengaturannya.

d. Pendekatan Ilmu Sosiologi

Menurut Kartodirdjo (1993:3) adalah “meliputi segi-segi mana yang berperan serta dalam nilai-nilai hubungan dengan golongan serta konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan sebagainya”. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan sosiologi bertujuan untuk menyoroti keadaan sosial masyarakat pampangan, individu atau kelompok mana yang berperan dalam Marga Pampangan di daerah Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Oleh karena data-data yang diperoleh tidak berhubungan dengan angka-angka, karakteristik atau sifat sesuatu, maka dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan data-data yang berhubungan dengan katagori, misalnya : ”sangat baik (SB), baik (B) dan lain-lain, yang merupakan kelanjutan peringkat kualitasnya” (Arikunto, 2010:21). Sesuai dengan penelitian sejarah maka usaha dalam mengumpulkan data-data disebut dengan heuristik adalah sebagai teknik yang digunakan dalam mencari atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Heuristik

adalah “suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmiah oleh karena itu heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum” (Abdurrahman, 2007:64).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “Suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang dialami” (Satori, 2012:25). “Mengumpulkan data dari penelitian dan mengumpulkan buku-buku yang relevan” (Nugroho, 1998:36).

Dengan demikian penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya sehingga dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data yang akurat dengan permasalahan yang penulis kaji, maka penulis mengumpulkan data-data melalui kegiatan observasi dan wawancara di desa Pampangan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969), penulis meneliti desa-desa yang ada dibawah pemerintahan Marga Pampangan pada masa kepemimpinana Depati Nangning Kamalajaya.

Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian skripsi ini, penulis melakukan studi pustaka dengan mengunjungi beberapa perpustakaan yaitu: Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang. Lokasi wilayah yang diteliti di daerah Pampangan seperti desa Pulau Betung, Bangsal dan Kuro.

E. Sumber Data

Sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh” (Arikunto, 2010:172). Sesuai dengan judul penelitian, maka sumber data penelitian terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari lapangan atau data skunder dan data yang bersumber dari buku-buku.

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, dalam hal ini yang respondennya kepada Nadjammudin sebagai mantan Kepala Desa sekaligus merupakan anak dari Depati Nangning Kamalajaya serta Yusuf dan Sarbini selaku toko masyarakat kemudian Perdi Dan Tuti yang merupakan cucu dari Depati Nangning Kamalajaya.

Untuk mengelola data-data yang bersumber dari buku dan dokumen, penulis mengadakan studi kepustakaan yaitu dengan mengunjungi beberapa perpustakaan.

Adapun sumber-sumber yang ada diperpustakaan antara lain: Buku karya Saudi Berlian tahun 2003, yang berjudul *Ogan Komering Ilir Dalam Lintas Sejarah*, Palembang pengarang Pemerintah Kabupaten OKI, Buku karya Saudi Berlian, tahun 2000, yang berjudul *Pengelolaan Tradisional Gender Telah Keislaman atas naskah*

Simboer tjahaya, Jakarta pengarang PT. Dyatama Milenia, Buku karya Saudi Berlian tahun 2003, Yang berjudul *Mengenal Seni Budaya Ogan Komering Ilir, Palembang* pengarang Pemerintah Kabupaten OKI, Buku karya Hanafiah, Djohan dan Widjaya, tahun 1996, yang berjudul *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di dalam Sumatera Selatan*, Pemda Tk I Sumatera Selatan, Buku karya Rahim, Husni, tahun 1989, yang berjudul *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi Tentang Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta pengarang Logos, dan Depdikbud. 1991. *Pola Penguasaan Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Palembang.

Selain sumber-sumber kepustakaan di atas, maka untuk menunjang sumber tersebut penulis mengumpulkan data lapangan, penulis mengadakan observasi dan wawancara dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi pegawai pada waktu pemerintahan Marga Pampangan.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Seperti telah dikemukakan bahwa usaha mengumpulkan data dalam metode sejarah disebut heuristik. Untuk mengumpulkan data-data penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik penelitian keperustakaan (*liberary research*) yaitu “ suatu penelitian yang diadakan diruang perpustakaan, dimana peneliti mendapat data dan informasi tentang objek penelitian melalui buku-buku” (Atar, 1993:8).

Dalam pengumpulan data secara kualitatif digunakan satu desain tertentu. Menurut Moleol dalam Arikunto (2010:22), penelitian kualitatif adalah “tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh penulis”.

Jenis penelitian dan analisis data prosedur pengumpulan data secara kualitatif yang memfokuskan pada penelaahan terhadap suatu kasus. Selain itu, penulis juga melakukan observasi, interview dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Hadi dalam Sugiono (2006:145), mengemukakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai pengamatan dan ingatan”. Observasi ini digunakan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya tahun 1926-1969. Observasi terutama dilakukan di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Wawancara

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti” (Sugiyono, 2010:137). Wawancara dalam penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh data-data tentang Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969). Wawancara dilakukan dengan Bapak Nadjamuddin (76) mantan Kepala Desa Pampangan sekaligus anak dari Depati Nangning Kamalajaya, kemudian wawancara dilakukan dengan Albakar Ciknang (48), Sarbini (45) dan Yusuf (51) selaku tokoh masyarakat, selanjutnya wawancara juga penulis adakan dengan Perdi (32) dan tuti (42) yang merupakan cucu dari Depati Nangning Kamalajaya. Selain melalui buku-buku, data-data penelitian juga penulis

peroleh dari para informasi, yaitu para tokoh masyarakat yang pernah bekerja di Kantor Marga Pampangan

Hasil dari observasi dan wawancara tersebut kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari data perpustakaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, sumber kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenggar, agenda foto dan sebagainya” (Arikunto, 2010:274). Untuk itu peneliti akan mengunjungi beberapa tempat yaitu perpustakaan untuk mencari naskah-naskah yang berhubungan dengan sumber-sumber penelitian ini, teknis dokumen digunakan penulis untuk mengambil foto rumah Marga Pampangan, Sekolah Marga Pampangan dan sumber-sumber dokumen lainnya menggunakan kamera.

G. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungannya tanpa memasukan angka-angka. Analisis data ini meliputi kritik sumber, interpretasi atau penafsiran dan historiografi.

1. Kritik Sumber

Terhadap data-data tersebut dilakukan kritik, baik kritik *eksternal* maupun kritik *internal*. Kritik eksternal adalah “cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah sedangkan kritik internal adalah “menekankan aspek dari dalam yaitu isi dari sumber kesaksian” (Sjamsuddin, 2007:134).

Berkaitan dengan kritik internal, hal yang dipertanyakan adalah data yang diperoleh, baik dari dokumentasi maupun dari keterangan hasil wawancara itu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan kritik eksternal adalah apakah sumber-sumber yang diperoleh otentik artinya bukan sumber-sumber sejarah yang palsu, sehingga relevan dengan penelitian yaitu tentang Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati nangning Kamalajaya (1926-1969).

2. Intepretasi atau Penafsiran

Langkah-langkah berikut adalah melakukan intepretasi atau penafsiran terhadap data-data yang telah melalui proses analisis tersebut kegiatan ini merupakan usaha untuk merangkaikan data-data sehingga menjadi deskripsi yang jelas tentang jalannya cerita sejarah. Menurut Kartadirdjo (1993:120), intepretasi adalah “penggunaan akal sehat dan konsep atau ciri serta teori yang ada pada disiplin ilmu sejarah. Dengan demikian intepretasi adalah usaha menafsirkan data sejarah mengandung arti”.

3. Historiografi

Sebagai langkah terakhir adalah melakukan penulisa sejarah atau *historiografi* yaitu: menyusun hasil penelitian sejarah, yaitu dalam format penulisan skripsi, secara sistematis, logis, kronologis, dan bersifat kualitas. “*historiografi* merupakan usaha untuk merekontruksi peristiwa-peristiwa sejarah kedalam penulisan sejarah sebagai sebuah kisah” (Hugiono, 1992:25).

Menurut Abdurrahman (1999:67) *historiografi* adalah “cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang sudah dilakukan layaknya

laporan penelitian ilmiah penulis, hasil penelitian harus memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir". Data dan fakta yang disajikan hendaknya mendekati kebenaran agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penulisan hasil penelitian sejarah ini disusun secara sistematis, logis dan kronologis. Adapun uraian singkat mengenai isi penelitian yang berjudul Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969) ini dapat penulis gambarkan dalam susunan bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan definisi istilah.

Bab dua merupakan bagian kajian pustaka yang isinya meliputi pengertian eksistensi, marga dan Kabupaten, tinjauan kondisi alamiah daerah Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi kondisi alamiah Ogan Komering Ilir serta kondisi alamiah Sumatera Selatan, tinjauan terhadap sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan dan biyografi Depati Nangning Kamalajaya.

Bab tiga merupakan bagian metode penelitian berisi tentang pengertian metode penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan bagian paparan data dan temuan temuan penelitian.

Bab lima merupakan bagian pembahasan yang berisi uraian tentang Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

pada masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969) yang meliputi permasalahan sebagai berikut: sejarah terbentuknya pemerintahan Marga Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelaksanaan sistem pemerintahan marga di Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969), kendala-kendala yang timbul pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969) dan dampak kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya di Marga Pampangan terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat (1926-1969).

Bab enam merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran .

Demikian sistematika penulisan skripsi dengan judul “Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut pertama sekali penulis melakukan usul bimbingan dan usul judul pada bulan November 2013, pengumpulan data dan pengajuan proposal pada bulan Desember 2013, pengajuan Bab satu, dua, tiga pada bulan April 2014, pengajuan Bab empat, lima dan enam pada bulan Mei 2014, penulisan daftar rujukan pada bulan Juni 2014, penulisan daftar isi dan lain-lain pada bulan Juli 2014, pada bulan Agustus ujian skripsi dan penjurian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan tahap-tahap sebagai berikut:

A. Deskripsi Data Hasil Observasi

Penulis melakukan kegiatan observasi, dengan melihat langsung ke beberapa tempat yaitu Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan hasil temuan yaitu rumah tempat tinggal Depati Nangning yang terdapat tulisan-tulisan Depati Nangning pada saat menjabat di Marga Pampangan, kemudian penulis berkunjung ke kantor marga yang ada di Desa Pampangan tetapi sekarang sudah diganti dengan kantor Kepala Desa dengan hasil temuan profil Desa Pampangan, dan penulis berkunjung ke Sekolah Marga tetapi sekarang diganti dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Pampangan, disini penulis bertemu dengan guru Sekolah Dasar tersebut yaitu Perdi, beliau bercerita singkat mengenai Marga Pampangan kemudian penulis menemui beberapa narasumber yang mengetahui masa pemerintahan Depati Nangning Kamalajaya di Marga Pampangan.

B. Deskripsi Data Hasil Dokumentasi

Penulis mendapat hasil dokumentasi melalui sumber tertulis bagi informasi sejarah yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang dengan hasil temuan yaitu skripsi Lastri. 2012. *Perkembangan Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Sistem Pemerintahan Marga ke Sistem Pemerintahan Desa Tahun 1974-1984 (Suatu Tinjauan Historis)*. Palembang:

Universitas Muhammadiyah Palembang, Perpustakaan Universitas PGRI Palembang dengan hasil temuan yaitu Ismail, M. Arlan. 2004. *Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti pres Palembang, Perpustakaan Daerah Palembang dengan hasil temuan yaitu Kartodidjro. 1992. *Perkembangan Ilmu Sosial Dalam Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, Perpustakaan pribadi milik Nadjamuddin dengan hasil temuan yaitu Berlian, Saudi. 2013, *Ogan Komering Ilir Dalam Lintas Sejarah*. Palembang: Pemerintahan Kabupaten OKI. Kantor Kepala Desa Pampangan dengan hasil temuan buku profil Desa Pampangan dan Kantor Camat Pampanga dengan hasil temuan data-data mengenai masyarakat Kecamatan Pampangan.

C. Deskripsikan Data Hasil Wawancara

Setelah melakukan observasi dan mendapatkan hasil dokumentasi, penulis melakukan wawancara, mengatur jadwal pertemuan dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan kepada Ahmad Nadjamuddin (76) sebagai anak dari Depati Nangning Kamalajaya pada tanggal 20 Maret 2014 di kediamannya yaitu Desa Pampangan, Yusuf (51) dan Sarbini (45) sebagai pegawai kantor marga pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Desa Pulaubetung, Syahbudin (70) sebagai pegawai kantor kebudayaan Desa Pampangan pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di desa Pampangan, Tuti (52) dan Perdi (32) sebagai cucu dari Depati Nangning Kamalajaya pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Desa Pampangan dan sumber-sumber lainnya.

Adapun beberapa sumber pertanyaan yang penulis tanyakan kepada Ahmad Nadjamuddin sebagai anak dari Depati Nangning Kamalajaya, Desa Pampanagan, Yusuf dan Sarbini sebagai pegawai kantor marga pada masa kepemimpinan Depati

Nangning Kamalajaya, Syahbuddin sebagai pegawai kantor kebudayaan Desa Pampangan, Tuti dan Perdi sebagai cucu dari Depati Nangning Kamalajaya, wawancara pertama dilakukan kepada Nadjamuddin seperti dibawah ini:

1. Bagaimana latar belakang keberadaan Marga Pampangan di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

Jawab :

Desa Pampangan merupakan salah satu rumpun suku bangsa, yang menyebar hal inilah yang merupakan sumber dari kelompok-kelompok etnis di iliran Sumatera Selatan. karena pola pemukiman mereka berorientasi ke sungai dan antara sungai yang satu dengan sungai lainnya belum terhubung menjadi satu seperti yang kita jumpai sekarang, maka rumpun suku bangsa ini berkembang sendiri-sendiri melahirkan sub-sub kelompok etnis yang penamaanya didasarkan pada penamaan aliran-aliran sungai seperti Komering, Ogan, Lematang, Kikim, Musi di samping nama-nama lain yang secara tradisional masih di pertahankan. Walaupun demikian ciri-ciri mereka yang berasal dari tiga kelompok besar tersebut, terutama di pandang dari segi bahasa dan budaya lainnya, masih tampak jelas kelihatan. Di pinggir sungai-sungai itu masing-masing rumpun suku bangsa ini menyebar membagi diri dalam kelompok-kelompok kekerabatan dekat (Ahmad Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

2. Bagaimana kondisi kehidupan politik masyarakat Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya khususnya tahun 1926-1969 ?

Jawab:

Pemilihan pasirah di Marga Pampangan dilakukan delapan tahun sekali, dengan sistem pemilihan pada awal pemerintahan marga menggunakan sistem pemilihan cumpuk, dalam sistem cumpuk, beberapa kontestan (calon) menempatkan diri berjajar ditanah lapang membelakangi kelompok pemilih. Selanjutnya dipanggil mata pilih yaitu rakyat satu persatu untuk menentukan calon pilihannya. Mata pilih setelah dipanggil namanya, satu persatu duduk dibelakang calon yang disenangi setelah dilakukan penghitungan, para kontestan yang mempunyai suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang (Ahmad Nadjamudin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

3. Bagaimana kondisi kehidupan sosial Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya tahun 1926-1969 ?

Jawab:

Pada masa pemerintahan marga, Marga Pampangan, partisipasi masyarakat pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya sebenarnya tidak terlepas dari adanya panutan atau contoh dari keberhasilan suatu pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemerintahan dahulu persiapan masyarakat dalam pembangunan desa diistilahkan dengan gawe dusun. Gawe dusun merupakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dusunya yang biasanya dimusyawarakan antara masyarakat dusun itu bersama dengan Kerio atau Pembarap sebagai penanggung jawab dusun. Pembangunan-pembangunan itu seperti membangun Balai marga, jalan, Masjid lain-lain.

Dalam hal ini biasanya setiap kepala keluarga atau rumah paling tidak mengirim salah satu dari anggota keluarganya untuk membantu pekerjaan dalam pembangunan Marga. Hal ini didasarkan atas kesadaran dan rasa malu jika tidak ikut

berpartisipasi membantu dalam pembangunan dusun (Ahmad Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

4. Bagaimana kendala masyarakat marga Pampangan bila dilihat dari segi sumber daya manusia, politik, psikologis masyarakat, pengelolaan keuangan masyarakat dan tanah milik marga pada saat kepemimpinan Depati Nangning Kamalajya ?

Jawab:

a. Sumber Daya Manusia

Pada awal masa pemerintahan marga Pampangan, kendala yang ada pada saat itu bila dilihat pada sumber daya manusianya adalah karena masyarakat yang masih premitif sehingga banyak sekali masyarakat buta huruf, masyarakatnya yang semangkin hari semangkin bertambah ini dikarenakan pada zaman Depati Nangning memerintah itu tidak ada keluarga berencana (KB) jadi masyarakat marga Pampangan rata-rata memiliki anak kuarang lebih 10 orang ketika zaman pemerintahan Ir. Sukarno barulah KB ini terbentuk tetapi masih ada kendala dengan adanya KB ini sebagian masyarakat berpendapat bahwa, KB haram karena menghalangi hidupnya seorang anak yang merupakan anugerah dari Allah SWT (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

b. Politik

Kendalam dalam bidang politik yang dialami di marga Pampangan yaitu pada saat pemilihan ketua marga beserta prangkatnya yang lain. Hal ini kadang kala ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan sehingga menyebabkan terjadinya percekcoakan, berkelahi dan bahkan pembunuhan tetapi bisa di atasi oleh

Kepala marga Pampangan yaitu Depati Nangning Kamalajaya (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

c. Pengelolaan Keuangan

Di Marga Pampangan pengelolaan keuangan sudah diatur oleh Kepala Marga Pampangan tetapi hal ini tidak terlepas dari pengawasan prangkat-prangkatnya yang lain, di dalam pengelolaan keuangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning kamalajya ada beberapa parangka yang korupsi uang lelang lebak lebung tetapi hal ini langsung ditanggapi oleh kepala marga sehingga perbuatan ini tidak berlangsung lama (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

d. Psikologis Masyarakat

Kendala di marga Pampangan juga ada dalam bidang psikologis masyarakat karena masyarakat pada saat itu masih premitif dan masih banyak juga yang tidak bersekolah, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hidup ini hanya untuk makan dan bekerja jadi kehidupan sehari-harinya diisi dengan bekerja di sawah, ladang dan lebak lebung, masyarakat yang seperti ini berlangsung cukup lama di marga Pampangan dan kemudian marga mendirikan sekolah dan mulailah masyarakat pada akhirnya menyadari pentingnya bisa membaca menulis dan berhitung (Nadjamuddi, *wawancara*, 20 Maret 2014).

e. Tanah Wilaya Marga Pampangan

Kendala yang ada di marga Pampangan yaitu pada Tanah milik marga Pampangan, tanah yang ada di wilayah marga Pampangan merupakan tanah milik marga Pampangan tetapi karena banyak warga yang masih belum mengetahui kepemilikan tanah ini sehingga ada saja masyarakat yang bukan marga Pampangan

memakai tanah untuk berladang hal ini jelas merugikan marga Pampangan (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

5. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat marga Pampangan pada masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya ?

Jawab:

Selain itu yang nampak jelas didalam Marga Pampangan adalah kehidupan sosial dalam hal pola tingkah laku terutama dalam hal pergaulan anak-anak muda apabila dibandingkan dengan pergaulan zaman sekarang itu sudah sangat berbanding terbalik. Anak-anak muda zaman sekarang seperti tidak tahu batasa-batasan dalam pergaulan antara pria dan wanita. Sudah banyak kejadian wanita hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Perubahan sosial yang begitu cepat selain karena pengaruh modernisasi dan kemajuan zaman, ini juga diduga karena salah satu faktor pemerintahan marga yang berdasarkan atas adat telah dihapuskan (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Adapun yang penulis tanyakan kepada Yusuf seorang mantan pegawai Kantor Marga Pampangan dan jawaban dari narasumber di kediamannya di Desa Pampangan pada tanggal 20 Maret 2014, akan penulis uraikan dibawah ini:

6. Bagaimana kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya 1926-1969 ?

Jawab :

Perekonomian penghidupan masyarakat Marga Pampangan pada umumnya bergantung pada Perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan dan perindustrian.

Pada sektor pertanian yaitu penanaman padi selain itu masyarakat Pampangan juga ada yang beternak hewan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, ayam dan lain sebagainya.

Penghasilan utama Marga Pampangan yaitu dengan cara berdagang pada masa pemerintahan marga warga Pampangan biasa berdagang dengan menggunakan perahu kajang mereka menjual berbagai bahan keperluan dapur hasil panen kebunnya hal ini dikarenakan wilayah Pampangan dikelilingi sungai yang mengelilingi wilayah Pampangan. Penghasilan utama masyarakat Marga Pampangan yaitu dengan berdagang dan beternak hewan (Yusuf, *wawancara*, 20 Maret 2014).

7. Apa saja tugas Pasirah, Dewan Marga, Juru Tulis Marga, Kerio, Pembarap, Penghulu/Khatib dan Peggawa ?

Jawab:

Kepala marga disebut dengan pasirah, sebagai penyelenggara urusan rumah tangga marga dan sebagai wakil pemerintah pusat. Karena pasirah adalah kepala marga sekaligus kepala adat wilayah pemerintahan terendah di wilayah Republik Indonesia. Sebagai pemerintah terendah maka pasirah melaksanakan semua peraturan dan instruksi dari atasan baik pemerintah pusat Dati I, tingkat II maupun atasan langsung. Tugas pasirah tersebut antara lain: pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintah pusat, membantu menarik pajak, masalah urusan agama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dewan marga atau disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Marga, tugas pokoknya adalah membuat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan pemerintah marga dan adat-istiadat yang berlaku dalam marga serta mengawasi pelaksanaan dari peraturan itu oleh pasirah dan perangkat-perangkatnya. Dewan

marga tidak turut mencampuri pelaksanaan pemerintahan marga tetapi hanya mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Juru tulis marga merupakan sekretaris pasirah yang tugasnya mengatur ketatausahaan, administrasi keuangan marga serta membuat konsep nilai marga, juru tulis marga ini di bantu oleh beberapa pegawai administrasi marga.

Kerio adalah seorang kepala dusun yang merupakan bawahan dari pasirah. Kerio merupakan perpanjangan tangan dari pasirah, sehingga seorang kerio juga berfungsi sebagai kepala adat tingkat dusun. Wilayah dusun terbagi dalam beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang yang dinamakan penggawa sebagai kepala kampung. Penggawa ini yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Penghulu dan khatib bertugas sebagai pembantu pasirah dalam urusan agama. Penghulu mengawasi urusan agama pada tingkat marga, sedangkan khatib mengawasi agama dalam tingkat dusun-dusun. Penghulu dan khatib diangkat oleh Bupati Daerah Tingkat II atas usul dari pasirah. Penghulu dan khatib mengurus segala sesuatu yang menyangkut kegiatan agama (Agama Islam) seperti pengurusan penguburan jenazah, penerima dan pembagian zakat, pencatat talak, cerai dan nikah, pembagian waris, pembawa do'a dan segala urusan pemeliharaan Masjid dan Langgar (Yusuf, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Sedangkan pertanyaan yang penulis kepada Sarbini, Mantan Pegawai Kantor Marga di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan jawaban dari narasumber di kediamannya Desa Pulaubetung pada tanggal 20 Maret 2014, akan penulis uraikan di bawah ini:

8. Bagaimana sistem pemerintahan marga di Marga Pampangan ini ?

Jawab:

Sistem pemerintahan marga yang ada di Marga Pampangan sama hal nya dengan marga-marga yang ada di wilayah Sumatera bagian Selatan lainnya. Selama berstatus marga terhitung Marga Pampangan pernah dipimpin oleh lima Depati salah satunya yaitu Depati Nangning Kamalajaya pada masa kepemimpinan Depati Nangning masyarakat pampangan makmur, damai dan sejahtera hal ini terbukti dari masa kepemimpinannya yang lama yaitu dari awal memerintah hingga beliau meninggal kemudian digantikan oleh menantunya (Sarhini, *wawancara*, 20 Maret 2014)

9. Apa saja sumber-sumber pendapatan di Marga Pampangan ?

Jawab:

Untuk lebih rinci dapat dilihat dari sumber-sumber keuangan Marga Pampangan sebagai berikut: Pajak marga, Lelang lebak lebung, sungai dan tanah nyurung, Sewa bumi, Sewa tanah , Hasil kerikil dan pasir, Sewa rumah sekolah milik marga, Pelayan kawin, Sewa perendaman karet, Sewa toko, Sewa balai marga, Sewa rumah marga, Hasil kembang ikan, Retribusi pasar, Surat keterangan izin mendirikan rumah, Izin mendirikan usaha, Izin potong hewan, Lain-lain pungutan biaya administrasi/surat izin (Sarhini, *wawancara*, 20 Maret 2014).

10. Bagaimana pengelolaan sumber-sumber ke uangan Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya tahun 1926-1969 ?

Jawab:

Sumber keuangan Marga Pampangan yang digolongkan dalam pendapatan asli marga. Dengan pendapatan asli Marga Pampangan dapat membiayai aktifitas-aktifitasnya, seperti menggaji Pasirah, Kerio, Penggawa, Penghulu dan Khatib demikian halnya dengan pembangunan fisik serta bangunan kalangan dan jalan (Sarhini, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Selanjutnya pertanyaan yang penulis tanyakan kepada Syahbuddin, pegawai Kantor Kebudayaan Marga Pampangan dan jawaban dari narasumber di kediamannya di Desa Pampangan pada tanggal 20 Maret 2014, akan penulis uraikan dibawah ini:

11. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Pampangan ?

Jawab:

Pada zaman dahulu, sebelum kemerdekaan, disuatu tempat bernama Pulo Leban, hidup sepasang suami isteri yang bernama Indra Giri Sakti dan istrinya Den Ayu. Pasangan suami isteri ini mempunyai dua orang anak yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konon menurut cerita pasangan ini berasal dari Cirebon Jawa Barat. Setelah hidup berpuluh-puluh tahun lamanya, pasangan ini berkembang turun temurun sehingga membuat perkembangan atau dusun yaitu dusun Sialang, Secondong dan Jermun.

Pulo Leban sendiri pada mulanya, adalah tempat dimana orang-orang biasa menggiring binatang buruan dan juga binatang ternak seperti Sapi, Kerbau, Rusa dan lain-lain. Salah seorang diantaranya adalah Raden Wiratako dari dusun Kuro. Untuk memudahkan menggiring binatang buruan atau ternak tadi, Raden Wiratako memasang empangan (kandang yang terbuat dari bambu) yang memanjang (tepatnya disimpang empat bekas kantor Road marga dusun 4 Pampangan sekarang).

Karena semangkin banyak yang memasang empanga dengan sendirinya nama Pulau Leban tidak disebut lagi, dan orang-orang akhirnya menyebutnya dengan Empangan. Kemudian oleh Indra Giri Sakti kata Empangan disebut Pengempangan yang artinya Bambu yang memanjang untuk memudahkan menggiring binatang buruan atau binatang ternak masuk kandang.

Pada zama kolonial Belanda, orang Belanda menyebut Pampangan kemudian tahun 1931, dimasa pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gouverment atau Gubernur Palembang kata Empangan dirubah menjadi Pampangan hingga sekarang.

Indra Giri Sakti dan Isterinya Den Ayu Meninggal di Dusun Pampangan dan makamnya sampai sekarang masih ada tepatnya dibelakang Desa Pampangan (Syahbudin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

12. Bagaimana proses Depati Nangning sehingga dapat menduduki jabatan pasirah di Marga Pampangan ?

Jawab:

Semasa hidupnya beliau diangkat menjadi Kerio di dusun Bangsal pada tahun 1905, karena sifat kepemimpinannya yang bagus kemudian beliau diangkat menjadi Depati di Marga Pampangan dengan mendapat gelar Pangeran. Untuk mengenang beliau masyarakat Pampangan memberi jalan yang ada di desa Pampangan dengan nama jalan Pangeran Nangning (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

13. Bagaimana kondisi kehidupan beragama masyarakat pampangan di Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning tahun 1926-1969 ?

Jawab:

Semua penduduk Marga Pampangan memeluk agama Islam atau 100% penduduk dusun Pampangan beragama Islam dan bisa dikatakan taat dalam menjalankan agama sebab hanya segelintir orang diantara mereka yang tidak taat dalam kehidupan beragama. Untuk menunjang kegiatan beragama, misalnya pengajian, majelis ta'lim, peringatan hari-hari besar Islam desa ini mempunyai fasilitas yang cukup yaitu satu Masjid dan satu Musholah. Mushola selain digunakan untuk pengajian, majelis ta'lim dan hari-hari besar Islam juga digunakan sebagai tempat TK/TPA yang mempunyai murid ratusan (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

14. Apa tindakan yang dilakukan oleh Depati Nangning dalam mensejahterakan warga masyarakat Pampangan ?**Jawab:**

Pelaksanaan pemerintah dalam urusan rumah tangga, Pemerintah Marga Pampangan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: Urusan umum, Urusan pemerintahan marga, Urusan agrarian, Urusan pekerjaan umum, Urusan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Urusan kebersihan dan pekuburan umum, Urusan pertanian, perikanan dan koperasi, Urusan perdagangan, Urusan sosial, Urusan agama, Urusan penerangan, Urusan pendidikan dan kebudayaan dan Urusan kesehatan. Dengan daftar urusan diatas bisa dilihat bahwa urusan otonomi Marga Pampangan sangat luas dan marga mampu melaksanakannya dengan keuangannya sendiri (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

15. Apakah ada tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam pembangunan marga Pampangan ?

Jawab:

Mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tetua-tetua yang memimpin marga Pampangan, diantaranya adalah:

a. Tokoh Pendidikan

Dimaksud dalam tokoh pendidikan disini adalah para guru, ustadz, ustadzah yang mengajar dilembaga pendidikan yang ada di desa Pampangan. Tugas dan fungsi mereka ini adalah memberikan atau mentransferkan pengetahuan yang mereka miliki kepada para generasi penerus dalam rangka membina pengetahuan dan tingkah laku mereka agar kelak dapat membangun masyarakat, agama dan bangsa dikemudian hari kelak (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

b. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah orang yang bertugas member nasehat, ceramah dan siraman rohani, mengetahui kegiatan keagamaan masyarakat. Misalnya tahlilan, yasinan mengurus jenazah dan sebagainya.

Tugas ini biasanya dilakukan oleh pembuka-pembuka masyarakat yang biasanya mereka panggil kiyai, mereka ini sangat besar sekali peranannya untuk membentuk masyarakat beragama atau masyarakat yang mempunyai aqidah yang kuat. Kegiatan yang mereka lakukan biasanya memberikan pengajian-pengajian, mengisi acara majelis ta'lim untuk membina pengetahuan agama masyarakat khususnya masyarakat desa Pampangan (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

c. Tokoh Pemerintahan

Tokoh pemerintahan agama, tokoh yang memimpin marga Pampangan yaitu mereka yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin mereka, kepala marga dan perangkatnya.

Mereka ini mengurus permasalahan masyarakat di bidang hukum pemerintahan, misalnya menyelesaikan perselisihan antara anggota masyarakat, member penyuluhan tentang hukum dan sebagainya.

Tiga komponen di atas semuanya harus bersatu, patut kita syukuri bahwasannya ketiga komponen-komponen tersebut dapat bekerjasama saling menunjang satu sama lain. Jadi pemerintahan tokoh akan mendukung segala kegiatan agama dan pendidikan yang ada di marga demi mencapai tujuan hidup bermasyarakat. Begitu juga sebaliknya, agama dan pendidikan memberi distribusi kepada pemerintah demi berjalannya roda kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera, baik didunia maupun di akhirat kelak. Itu semua tidak akan tercapai tanpa adanya akidah yang mantap, yang tidak mudah tergoyahkan oleh segala terapan.

Jadi, dari berbagai komponen di atas, baik itu pendidikan, agama maupun pemerintah tanpa adanya aqidah persatuan yang kuat tanpa adanya keimanan akan hancur, sebab aqidah adalah landasan bagi terciptanya akhlak mulia dan akhlak mulia merupakan sarana yang paing mendasar untuk pembangunan suatu masyarakat, agama dan bangsa. Adapun pusat kegiatan keagamaan dan kepribadian di marga Pampangan ini telah didirikan masjid sebanya 3 buah. Masjid ini sebagai tempat peribadatan. Selain itu juga terdapat mushola/langgar sebanyak 3 buah. Selain tempat

peribadatan juga digunakan sebagai tempat pengajian dan tempat pengajian TK/TPA Al Qur'an (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Kemudian pertanyaan yang penulis tanyakan kepada Tuti, merupakan cucu dari Depati Nangning Kamalajaya dan jawaban dari narasumber di kediamannya yaitu Desa Pulaubetung pada tanggal 20 Maret 2014, akan penulis uraikan di bawah ini:

16. Apa kelebihan Depati Nangning dapat memerintah selama 47 tahun ?

Jawab:

Kelebihan dari Pangeran Nangning ini sebenarnya sudah masyarakat Pampangan ketahui bahwa selain sifat kepemimpinannya yang bagus Pangeran ini juga dikenal dengan sifatnya yang ramah, mengayomi dan sangat tegas dalam memerintah Marga Pampangan mungkin hal ini lah yang membuat masyarakat Pampangan menyenangi sosok pemimpin seperti Nangning Kamalajaya (Tuti, *wawancara*, 20 Maret 2014).

17. Bagaimana kiat Depati Nangning memerintah Marga Pampangan ?

Jawab:

Usaha yang dilakukan Nangning dalam memerintah marga Pampangan yaitu dengan memberikan perhatian yang khusus terhadap warga marga Pampangan yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, keamana dan agamanya masing-masing. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Depati Nangning hal inilah yang mebuat warga marga Pampangan sangat menyenangi Pangeran Nangning (Tuti, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Selanjutnya pertanyaan yang penulis tanyakan kepada Perdi, merupakan cucu dari Depati Nangning Kamalajaya dan jawaban dari narasumber di kediamannya Desa Pulaubetung pada tanggal 20 Maret 2014, akan penulis uraikan dibawah ini:

18. Apa kendala yang ada di Marga Pampangan ?

Jawab:

Sama halnya dengan Marga-marga lain yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir lainnya yaitu kendalanya dalam bidang perekonomian, biasanya lebak lebung yang ada di marga masing-masing itu sudah ditentukan tetapi kadang-kadang ada saja yang mencari ikan di lebak lebung milik marga lain, hal yang sepele inilah sering membuat kekacauan antar marga (Perdi, *wawancara*, 20 Maret 2014).

19. Apa saja peninggalan pembangunan pada masa pemerintah Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning ?

Jawab:

Banyak peninggalan dari Depati Nangning seperti Pasar Kalangan yang ada di Kampung Ilir Desa Pampangan dan jalan-jalan yang ada di Marga Pampangan tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman yang semakin maju makan kalangan dan jalan-jalan dibangun kembali oleh pemerintah Kecamatan Pampangan (Perdi, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Demikianlah wawancara yang penulis lakukan di Desa Pampangan dan Desa Pulaubetung Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V

SEJARAH MARGA PAMPANGAN KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA MASA KEPEMIMPINAN DEPATI NANGNING KAMALAJAYA (1926-1969).

A. Sejarah Terbentuknya Marga Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Asal Usul Sistem Pemerintahan Marga

Pada tahap awal perkembangan dari Marga yang kita kenal sekarang, jelas pada mulanya merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang bersendikan azas turunan darah (*genealogische rechtgemeenschap*). Pada tahap kesatuan masyarakat hukum berazaskan turunan sedarah ini, sistem pemerintahan dari ketiga rumpun suku bangsa di Iliran Sumatera Selatan berbeda-beda namanya. Di daerah Batang hari Komering kelompok keturunan itu menempati daerah yang di sebut *morga*, di kepalai oleh seorang Sepuh yang berfungsi sebagai *Ratu Morga* dengan gelar *ai PatiI*. Anak tua (*anak-tuha, ompu tuha*) ini dalam sistem kekerabatan di daerah iliran di sebut *barop*. Dalam jabatan mewakili: *Ratu Morga* atau *Kai Pati* ini, ia disebut *pambarop* diletakan di pundak adik atau saudara Ratu dengan gelar *Mangku Morga* (Ismail. 2004:10).

Sejalan dengan uraian-uraian terdahulu tentang marga sudah menjadi kenyataan sejarah sejak berabad-abad yang lalu bahwa pemerintahan marga di daerah Sumatera Selatan (propinsi Sumatera Selatan, propinsi Lampung, dan propinsi Bengkulu sekarang) adalah primadona bagi rakyat daerah tersebut untuk secara langsung tempat berlindung, bernaung dan kehidupan baik perorangan maupun

kelompok masyarakat (Pemerintah Propinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. 1996:455).

Apa yang diutarakan diatas adalah merupakan bentuk dan sistem pemerintahan dari berbagai rumpun suku di uluan Sumatera Selatan semasa awal perkembangannya yang masih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berazaskan geneologi.

2. Pada Masa Kesultanan Palembang

Wilayah basis dari catatan sejarah yang kita ungkapkan diatas (Roy de Faile 1927) kita dapat mengetahui raja-raja atau sultan-sultan Palembang adalah berasal dan mempunyai hubungan daerah dengan raja-raja. Oleh karena itu sistem pemerintahan yang mereka anut adalah daerah kesultanan Palembang yang sebenarnya adalah sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah-daerah yang langsung dibawah pemerintahan sultan yaitu daerah Belida dan Pegagan (Ogan Ilir). Sistem Perdikan yang merupakan daerah bebas pajak di Jawa, dibawah dan diterapkan di Palembang dengan nama daerah sikap. Pemerintahan pusata yang disusun, mengingatkan kita pada sistem Catur Menggala di Jawa yang di Palembang dikenal dengan 4 Manca Negara. Empat Manca Negara itu terdiri dari Sultan, Papatih, Penghulu dan Kepala Pangalasan (Jaksa). Namun tampaknya sistem pemerintahan serupa itu hanyalah berlaku di Ibukota, sedangkan didaerah uluan, tetap berlangsung sebagaimana adanya (Ismail. 2004:19).

Wilayah-wilayah tersebut, berdasarkan semacam perjanjian atau persumpahan dihadapan pejabat Kesultanan langsung dikuasi oleh pemerintah, daerah-daerah ini disebut daerah *Kepungutan* (asak kata pungut), yang dapat diartikan

sebagai pengambilan daerah itu menjadi daerah dikuasi penuh oleh pemerintah kesultanan, dimana dapat dilakukan pungutan-pungutan natura untuk kepentingan kesultanan (Pemerintah Propinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. 1996:455).

Dengan diiringi orang-orang dari daerah sikap, raja sering mudik ke hulu-hulu sungai pergi pesiar, berburu dan menangkap ikan. Pada saat-saat serupa itu dimanfaatkan untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan para kepala marga. Dengan beberapa kepala marga mencapai kata sepakat untuk mengadakan persahabatan dimana daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi mereka ke Palembang, tetapi sebagai imbalanya mereka diwajibkan membayar pajak, dan sewaktu-waktu diperlukan diminta pula untuk menyediakan tenaga kerja. Daerah-daerah tersebut dinamakan kepungutan yang meliputi daerah Musi Ilir, Lematang Ilir, Ogan Ulu, Komering Ilir dan Komering Ulu (Ismail. 2004:22).

Marga-marga dalam daerah kepungutan diwajibkan membayar upeti atau pajak, baik dalam bentuk uang atau natura, kecuali wilayah-wilayah Sikap yang bebas pajak. Pajak dalam bentuk natura disebut tiban-tukon. Tiban bearti penyerahan hasil-tanaman untuk pemasaran seperti beras dan rempah-rempah antara lain marica dengan harga yang rendah yang ditetapkan oleh orang-orang yang dikirim oleh sultan, yang juga membayarkan harga hasil bumi yang diterima dengan memberikan kain-kain atau barang-barang besi. Dihargakan menurut ketetapan sultan sendiri (Pemerintah Propinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. 1996:456).

Dalam banyak hal ada diantara kepala marga terkesan menjadi orang perantara dan alat dari pada kehendak yang (dianggap) lebih tinggi, yang berada diluar masyarakat, dalam hal ini adalah penguasa Palembang yang dikemudian hari

menjadi Kesultanan. Untuk menjamin kelancaran pungutan-pungutan pajak, maka ditiap aliran sungai (Satu Raban Bantang Hari) ditempatkan seorang Jenang yang mengkoordinir marga-marga dalam aliran sungai itu. Kekuasaan raja makin lama makin erat didukung oleh keadaan dan situasi dimana sering timbul perselisihan antara marga yang satu dengan marga yang lain. Masalah batas marga sering menjadi pertikaian yang tidak jarang menimbulkan ketegangan pada saat serupa ini diperlukan pihak ketiga untuk dapat dijadikan wasit. Tangan raja datang untuk meleraikan raja atau sultan bertindak jika perlu sebagai penengah perselisihan antar marga. Dalam keadaan demikian kekuasaan raja makin lama makin intensif dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ratu Sinuhun (1630-1642 M). Pada masa inilah segala sesuatu dilembagakan sehingga dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala marga dalam suatu kesatuan dengan ratu Sinuhun adalah penguasa yang dianggap sebagai seseorang yang membuat peraturan-peraturan atau melembagakan aturan-aturan adat pertama di uluan yang kelak dikemudian hari dijadikan kitab undang-undang Simbur Cahaya (Ismail. 2004:23).

3. Marga Pada Masa Pemerintahan Belanda

Pada tahun 1642 V.O.C. mendirikan lojinya di sungai Aur, yaitu didaerah seberang ulu kota Palembang sekarang. Persengketaan antara VOC dengan pihak kesultanan sering terjadi dan mencapai puncaknya dibawah pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II ditahun 1819 dan 1821 M. dibawah jendral V. de Kock ditahun 1821 Belanda mengadakan ekspedisi militernya secara besar-besaran ke Palembang. Sesudah mengadakan perlawanan yang gigih, akhirnya pada tanggal 6 juli 1821 Sultan Mahmud Badarudin II dapat ditawan oleh Belanda, yang untuk

seterusnya diasingkan ke Ternate pada bulan Maret 1822 M. semenjak itu Pemerintahan Kesultanan Palembang, walaupun masih berdiri, berada dibawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Sultan terakhir adalah sultan A. Naddjamudin III yang diturunkan tahta pada tahun 1823, kemudian digantikan oleh pangeran Kramajaya dalam kedudukan sebagai Papatih dan pegawai dari Residen Palembang sampai tahun 1855. Sesudah itu berakhirilah Pemerintahan Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan (Ismail. 2004:26).

Selanjutnya, Pemerintah Belanda melanjutkan mempergunakan kesatuan-kesatuan pemerintahan asli ini (egalisasi) dengan beberapa macam tugas kekuasaan dalam kesatuan-kesatuan yang dimaksud. Dapat dikatakan bahwa kewibawaan pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan terhadap rakyat justru tumbuh dan berkembang dengan mempergunakan kesatuan-kesatuan pemerintahan asli ini dengan biaya dan usaha yang relative ringan. Semua kesatuan-kesatuan ini disebut secara seragam marga (Pemerintah Propinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. 1996:457).

Tata tertib yang semula merupakan aturan kebiasaan penduduk di margamarga Ulu Palembang, kemudian berkembang menjadi aturan-aturan yang mengakui kekuasaan Kesultanan Palembang atas tanah serta kehidupan sosial mereka dengan nama Simbur Cahaya dan Sindang Mardike kemudian berlanjut pula menjadi aturan adat yang dibukakan serta dicetak pertama ditahun 1865 dengan aksara Arab Melayu. Simbur Cahaya kondifikasi itu terdiri dari lima bab dengan 178 pasal yang antara lain memuat:

Bab I terdiri dari 32 pasal yang memuat adat bujang gadis dan kawin. Bab ini mengatur etika pergaulan lelaki dan perempuan dengan segala bentuk larangannya dan mengatur tentang proses perkawinan antara bujang gadis maupun janda duda. Bab II terdiri dari 29 pasal yang memuat aturan marga dan berisi tentang tata cara pemilihan kepala marga dan wakilnya serta wewenang yang melekat padanya. Bab III terdiri dari 34 pasal yang memuat aturan dusun dan berladang yang kita jumpai dalam aturan dusun dalam suatu marga yang disebut Pengandang atau Peroatin serta hak dan tanggung jawabnya ditambah dengan tata tertib penduduk untuk menggunakan tanah lading. Bab IV Terdiri dari 19 pasal yang memuat aturan kaum, aturan kaum dimaksudkan dalam bab ini adalah aturan pengurus agama Islam yaitu: Penghulu Agama, Khatib dan Kaum, serta memuat kewajiban dan hak-haknya dibidang pelaksanaan syariat agama Islam. Bab V terdiri dari 58 pasal yang memuat adat perhukuman. Bab ini berisi aturan-aturan hukuman terhadap tindakan pidana kejahatan maupun pelanggaran dan aturan perdata antara sesama warga (H.A. Lamsyari. 1987:69).

Walaupun Simbur Cahaya ini tidak mungkin dapat mencatat seluruh adat istiadat yang berlaku bagi semua kelompok etnis diuluan Sumatera Selatan, namun yang tertulis itu telah dijadikan pegangan dalam tata kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan daerah uluan Sumatera Selatan selama ini.

Suatu marga jika mempunyai kemampuan dana, atas izin *Depertemen onderwys* dan *erendienst* diperkenalkan untuk membangun sekolah desa (*Volk Onderwys*) didalam marganya. Pada kantor marga terdapat:

1 (satu) orang Pasirah, 1 (satu) orang Pembarap (Wakil Pasirah), 1 (satu) orang juru tulis Marga dan 1 (satu) orang Opas. Balai marga (Komerling: *sosat*) digunakan untuk pertemuan rakyat marga dan juga tempat menempelkan pengumuman-pengumuman. Ditingkat dusun, tidak semua dusun mempunyai balai, namun yang pasti adalah disetiap dusun, dibangun gardu-gardu (*Pos*) tempat menempelkan pengumuman-pengumuman. Gardu dijaga oleh satu orang atau lebih kemit yang dilakukan oleh

warga dusun secara bergilir. Dalam keadaan yang dianggap penting kemit ditugas untuk mengumumkan suatu pengumuman dengan memukul canang keliling dusun (Ismail. 2004:40).

4. Marga Pada Masa Pemerintahan Jepang

Pada tahun 1942 Jepang mengambil alih pemerintahan atas Kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa ini pemerintahan marga tidak banyak mengalami perubahan, Jepang hanya melanjutkan struktur dan sistem pemerintahan pada masa sebelumnya. Dapat dikatakan tidak ada perubahan yang prinsip. Perubahan-perubahan yang terjadi hanya perubahan sebutan saja, misalnya:

- a. Syu-Seityo, setingkat dengan Resident
- b. Bun Syu-tjo, setingkat dengan Asisten Resident
- c. Gun-tjo, setingkat dengan Demang
- d. Son-tjo, setingkat dengan Pasirah
- e. Ku-tjo, setingkat dengan Kerio
- f. Fura Ku-tjo setingkat dengan Penggawa (Berlian, 2013:56-57).

Disamping perubahan sebutan seperti diatas, pada zaman Jepang kehidupan demokratis tidak diperkenankan. Dewan-dewan dibubarkan, otonomi diselenggarakan oleh jalur dekonsentrasi. Hal ini berarti tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta mencampuri urusan pemerintahan.

Jepang boleh dikatakan tidak mengadakan perubahan dalam susunan pemerintahan marga, akan tetapi justru memanfaatkan susunan dan kewibawaan pemerintahan marga yang diwarisinya dari Belanda untuk kepentingan peperangan Jepang menghadapi sekutu, untuk menghapuskan penjajahan orang-orang Barat

terhadap orang-orang Asia, orang-orang Timur. Jadi pemerintah marga memainkan peranan yang penting dalam pengadaan keperluan-keperluan dan kebutuhan peperangan Jepang melawan sekutu, yang diusahakan dari rakyat, baik secara sukarela ataupun secara paksa. Tindakan pemerintahan marga (Kepala Marga) terhadap rakyat ini, karena caranya yang bersifat memaksa, sebab senantiasa didorong oleh iklim perasaan khawatir akan dianggap anti Jepang, kalau tidak dapat memenuhi pemerintahan-pemerintahan tentara Jepang dan akan mengalami siksaan, dirasakan oleh rakyat sebagai tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dari Kepala Marga dimaksud, yang menimbulkan perasaan benci secara latent dihati sebagian besar rakyat. Perasaan dendam inilah meletus sesudah saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 (Pemerintah Propinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. 1996:484).

5. Pada Masa Kemerdekaan

Diboncengi perasaan-perasaan dendam karena masih teringat tindakan-tindakan penindasan yang dilakukan untuk kepentingan perang Jepang, sungguhpun ini hanya dilakukan karena diperintahkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dengan ancaman sanksi penganiyayaan kalau tidak dapat dipenuhi dengan alasan apapun juga dan disana sini mungkin pula oleh perasaan dendam yang berlatar belakang pada persaingan perebutan kedudukan sebagai Kepala Marga, yang di zaman pemerintah Belanda secara teoritis merupakan kedudukan seumur hidup, yang hanya akan diganti karena terbuka lowongan disebabkan kematian atau kesalahan kriminal atau administratif (menggelapkan uang marga atau melalaikan tugas yang diperintahkan seperti memungut pajak penghasilan kecil-*inkomstenbelasting*, *kleine*

aanslang), terjadilah penculikan-penculikan malahan penganiyayaan sampai meninggal terhadap golongan ini. Usaha-usaha menenangkan gejolak ini makan waktu yang agak panjang dengan memperhatikan dan memberikan seluruh pada hasrat rakyat (Pemerintah Propinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. 1996:485).

Tahun 1965 pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja yang mencabut Stb. 1938 Nomor 440. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tetap berlaku, namun situasi dan kondisi pada waktu itu tidak dapat memberlakukanya. Maka dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 yang menyatakan “tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang (termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965) hingga terbentuknya undang-undang baru yang mengatur pemerintahan marga” (Sudirwo, 1981:41).

Khusus untuk marga-marga dalam wilayah administrasi Propinsi Sumatera Selatan diberlakukan peraturan daerah sumatera selatan:

1. Peraturan daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 1/DPRD.GR.SS/1967. Tentang prosedur, pengakuan dan pengesahan, pemecatan sementara serta pemberhentian pamong marga termasuk kepala marga di dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan, menetapkan kembali pemilihan pamong praja.
2. Peraturan daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 3/DPRD.GR.SS/1967 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPRD Marga) yang dipilih secara umum, langsung dan rahasia oleh rakyat marga yang bersangkutan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

3. Peraturan daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 4/DPRD.GR.SS/1967 Tentang pemilihan penghulu, yaitu pejabat agama tingkat marga dan khotib, pejabat agama tingkat dusun, secara bertingkat. Penghulu dipilih oleh anggota DPRD marga, pamong marga lainnya. Sedangkan khotib diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
4. Mengenai masa jabatan khusus kepala desa dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 tahun 1978 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberitahuan sementara dan pemberhentian kepala desa ditetapkan bahwa kepala desa dipilih secara umum, bebas dan rahasia. Sedangkan masa jabatan bagi kepala desa ditetapkan selama delapan tahun terhitung mulai saat pelantikan dan yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali selama satu kali masa jabatan berikutnya (Depdikbud, 1991:43).

Sebenarnya sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan belum pernah memiliki model pemerintahan yang betul-betul ideal yang mampu menjadikan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, berkepribadian luhur yang didasarkan atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

B. Sistem Pelaksanaan Marga di Pampangan Serta Kendala-kendala pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamlajaya (1926-1969)

Sudah menjadi kewajiban tiap-tiap orang akan mengetahui segala aturan dan adat-adat yang terpakai dalam negerinya atau mengetahui segala undang-undang yang patut diturutinya, segala suruh yang mesti dikerjakan dan segala tegah yang patut di hindarkan. Sama halnya dengan marga yang ada di Marga Pampangan, Marga

Pampangan memerintah marga berdasarkan undang-undang simbur cahaya (H.A. Lamsyari, 1987:1).

Kehidupan Marga Pampangan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat. Dalam peta yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda pertama kali pada tahun 1921, sebagai besar marga dalam kedua wilayah onderafdeling di atas, dimuat dibawah judul "Merandjat".

Marga adalah suatu kesatuan organisasi terbentuk berdasarkan teritorial geneologis, yang secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di lingkungannya. Secara tradisional marga merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung dan dusun (Berlian. 2003:40).

Suatu pemerintahan marga, dalam fungsi pelaksanaan ini penyelenggaraannya dipimpin oleh Pasirah/Kepala Marga dan dibantu oleh pamong-pamong marga lainnya seperti pembarab, kerio, penghulu, khatib dan juru tulis marga. Dalam sistem pemerintahan marga yang sudah terdiferensi secara structural dan fungsional ini, ditegaskan bahwa aparat pelaksanaan menyelenggarakan hal-hal yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Marga Pampangan.

Pelaksanaan pemerintah dalam urusan rumah tangga Pemerintah Marga Pampangan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Urusan umum

Urusan umum yang dimaksud adalah urusan kegiatan Marga Pampangan yang bersifat umum.

2. Urusan agrari

Urusan agrari merupakan urusan kepemilikan pertanian atau tanah pertanian yang ada di Marga Pampangan.

3. Urusan pekerjaan umum

Urusan pekerjaan umum dimaksud adalah urusan pekerjaan yang ada di Marga Pampangan meliputi pekerjaan swasta lainnya.

4. Urusan pembangunan masyarakat desa (PMD)

Urusan pembangunan masyarakat desa yaitu urusan pembangunan kalangan (pasar), pembangunan jalan serta pembangunan-pembangunan lainnya yang ada di Marga Pampanagan.

5. Urusan kebersihan dan pekuburan umum

Urusan kebersihan dan perkuburan umum yang dimaksud adalah urusan kebersihan dan perkuburan ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Marga Pampangan.

6. Urusan pertanian, perikanan dan koperasi

Urusan pertanian, perikanan dan koperasi adalah urusan pekerjaan masyarakat Marga Pampangan.

7. Urusan perdagangan

Urusan perdagangan yang dimaksud adalah proses jual beli yang dilakukan masyarakat Marga Pampangan di kalangan (pasar) meliputi jual beli beras, sayur-mayur, ikan dan bahan-bahan kebutuhan dapur lainnya.

8. Urusan sosial

Urusan sosial yang dimaksud adalah urusan sosial masyarakat marga pampangan dengan marga-marga lain yang ada di Sumatera bagian Selatan lainnya.

9. Urusan agama

Urusan agama yang ada di Marga Pampangan meliputi urusan pengajian anak-anak yang dilaksanakan di masjid dan langgar serta perayaan-perayaan hari besar agama Islam lainnya.

10. Urusan penerangan

Urusan penerangan karena pada masa kepemimpinan Depati Nangning belum memiliki listrik jadi pada saat itu masyarakat masih menggunakan lampu yang terbuat dari bambu dan lampu ini apabila malam tiba harus ada di depan rumah masing-masing warga masyarakat Marga Pampangan.

11. Urusan pendidikan dan kebudayaan

Urusan para guru, ustadz, ustadzah yang mengajar dilembaga pendidikan yang ada di desa Pampangan. Tugas dan fungsi mereka ini adalah memberikan atau mentransferkan pengetahuan yang mereka miliki kepada para generasi penerus dalam rangka membina pengetahuan dan tingkah laku mereka agar kelak dapat membangun masyarakat, agama dan bangsa dikemudian hari kelak.

12. Urusan kesehatan

Urusan kesehatan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya karenan fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan sehingga masyarakat Marga Pampangan mempercayai dukun serta orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih (Widjaja, 2003:35).

Dengan daftar urusan diatas bisa dilihat bahwa urusan otonomi Marga Pampangan sangat luas dan marga mampu melaksanakanya dengan keuanganya sendiri.

Kemampuan keuangan Marga Pampangan dapat dilihat dari kemampuanya untuk membuat berbagai bangunan di wilayahnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari sumber-sumber keuangan Marga Pampangan sebagai berikut:

1. Pajak marga

Pajak marga merupakan pajak yang dihasilkan dari masyarakat Marga Pampangan yang memakai barang atau benda milik marga.

2. Lelang lebak lebung, sungai dan tanah nyurung

Pajak dari lelang lebak lebung dibayar oleh orang yang akan mencari ikan di lebak tetapi sebelum diambil ikan nya lebak harus terlebih dahulu dibayar kepada kepada marga.

3. Sewa bumi

Sewa bumi yang dimaksud adalah sewa yang dibayar seluruh masyarakat Marga Pampangan karena sudah memiliki rumah yang bertempat tinggal di tanah milik marga.

4. Sewa tanah

Sewa tanah yang dimaksud adalah sewa terhadap orang-orang yang memakai tanah marga untuk berkebun atau berladang.

5. Hasil kerikil dan pasir

Hasil krikil dan pasir yaitu pasir dan krikil diambil dalam sungai yang ada di Marga Pampangan kemudian yang mengambil krikil dan pasir ini harus membayar pajak kepada Marga Pampangan.

6. Sewa rumah sekolah milik marga

Sewa rumah sekolah yaitu sekolah yang telah didirikan oleh marga kemudian sewanya dibayar oleh pihak sekolah kepada kepala marga.

7. Pelayan kawin

Masyarakat Marga Pampangan apabila akan menikah harus membayar uang kepada kepala marga.

8. Sewa balai marga

Sewa balai marga juga berlaku terhadap Marga Pampangan yaitu dengan membayar uang kepada kepala marga setelah memakai balai marga untuk keperluan pribadi masyarakat.

9. Hasil kambang ikan

Sewa kambang ikan milik marga dan dibayar oleh masyarakat Marga Pampangan yang memelihara ikan dikambang milik marga tersebut.

10. Retribusi pasar

Pajak retribusi pasar adalah pajak yang dibayar melalui hasil pemungutan pajak terhadap penjual yang berjualan dikalangan Marga Pampangan.

11. Surat keterangan izin mendirikan rumah

Apabila akan mendirikan rumah masyarakat Marga Pampangan harus membayar uang kepada kepala marga.

12. Izin mendirikan usaha

Sama halnya dengan izin mendirikan usaha di Marga Pampangan, masyarakat juga harus membayar pajak kepada kepala marga.

13. Izin potong hewan

Izin potong hewan yang dilakukan di Marga Pampangan juga harus mendapat izin dari kepala marga dan harus membayar pajak.

14. Lain-lain pungutan biaya administrasi/surat izin

Selain biaya pajak diatas juga terdapat pajak-pajak yang tag terduga di Marga Pampangan dan harus membayar sewa kepada kepala marga (widjaja, 2003:29).

Sumber-sumber keuangan yang dimaksud diatas adalah sumber keuangan Marga Pampangan yang digolongkan dalam pendapatan asli marga. Dengan pendapatan asli Marga Pampangan dapat membiayai aktifitas-aktifitasnya, seperti menggaji Pasirah, Kerio, Penggawa, Penghulu dan Khatib demikian halnya dengan pembangunan fisik serta bangunan kalangan dan jalan.

Sama halnya dengan Marga-marga lain yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir lainnya yaitu kendalanya dalam bidang perekonomian, psikologis masyarakat, sumber daya manusia di marga Pampangan, politik, pengelolaan keuangan dan tanah milik Marga Pampangan. Masalah-masal berikut akan penulis uraikan yaitu:

1. Kendala Dalam Bidang Sumber Daya Manusia

Pada awal masa pemerintahan Marga Pampangan, kendala yang ada pada saat itu bila dilihat pada sumber daya manusianya adalah karena masyarakat yang masih premitif sehingga banyak sekali masyarakat buta huruf, masyarakatnya yang

semangkin hari semangkin bertambah ini dikarenakan pada zaman Depati Nangning memerintah itu tidak ada keluarga berencana (KB) jadi masyarakat Marga Pampangan rata-rata memiliki anak kuarang lebih 10 orang ketika zaman pemerintahan Ir. Suekarno barulah KB ini terbentuk tetapi masih ada kendala dengan adanya KB ini sebagian masyarakat berpendapat bahwa, KB haram karena menghalangi hidupnya seorang anak yang merupakan anugerah dari Allah SWT (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

2. Kendala Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan

Kendala dalam bidang politik dan pemerintahan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamlajaya yang dialami di Marga Pampangan antarlain pada saat pemilihan ketua marga beserta prangkatnya yang lain. Hal ini kadang kala ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan sehingga menyebabkan terjadinya percekcoakan, berkelahi dan bahkan pembunuhan tetapi bisa di atasi oleh Kepala Marga Pampangan yaitu Depati Nangning Kamlajaya (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

3. Kendala Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Di Marga Pampangan pengelolaan keuangan sudah diatur oleh kepala Marga Pampangan tetapi hal ini tidak terlepas dari pengawasan prangkat-prangkatnya yang lain, di dalam pengelolaan keuangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning kamalajya ada beberapa parangka yang korupsi uang lelang lebak lebung tetapi hal ini langsung ditanggapi oleh kepala marga sehingga perbuatan ini tidak berlangsung lama (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

4. Kendala Dalam Bidang Psikologis Masyarakat

Kendala di Marga Pampangan juga ada dalam bidang psikologis masyarakat karena masyarakat pada saat itu masih premitif dan masih banyak juga yang tidak bersekolah, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hidup ini hanya untuk makan dan bekerja jadi kehidupan sehari-harinya diisi dengan bekerja di sawah, ladang dan lebak lebung, masyarakat yang seperti ini berlangsung cukup lama di Marga Pampangan dan kemudian marga mendirikan sekolah dan mulailah masyarakat pada akhirnya menyadari pentingnya bisa membaca menulis dan berhitung (Nadjamuddi, *wawancara*, 20 Maret 2014).

5. Kendala Dalam Penentuan Batas Tanah Marga Pampangan

Kendala yang ada di Marga Pampangan yaitu pada Tanah milik Marga Pampangan, tanah yang ada di wilayah Marga Pampangan merupakan tanah milik Marga Pampangan tetapi karena banyak warga yang masih belum mengetahui kepemilikan tanah ini sehingga ada saja masyarakat yang bukan Marga Pampangan memakai tanah untuk berladang hal ini jelas merugikan Marga Pampangan (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di wilayah Pampangan, kendala-kendala yang ada tersebut di atas di Marga Pampangan hanya saja masalah-masalah yang sepele dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Marga Pampangan.

C. Dampak Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya terhadap Kondisi Sosial, Pendidikan, Keamanan dan Ekonomi Masyarakat Pampangan (1926-1969).

1. Dampak Terhadap Kondisi Sosial

Partisipasi masyarakat pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamlajaya sebenarnya tidak terlepas dari adanya panutan atau contoh dari keberhasilan suatu pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pemerintahan dahulu persiapan masyarakat dalam pembangunan desa diistilahkan dengan gawe dusun. Gawe dusun merupakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dusunya yang biasanya dimusyawarkan antara masyarakat dusun itu bersama dengan Kerio atau Pembarap sebagai penanggung jawab dusun. Pembangunan-pembangunan itu seperti membangun balai marga, jalan, Masjid dan lain-lain. Dalam hal ini biasanya setiap kepala keluarga atau rumah paling tidak mengirim salah satu dari anggota keluarganya untuk membantu pekerjaan dalam pembangunan Marga. Hal ini didasarkan atas kesadaran dan rasa malu jika tidak ikut berpartisipasi membantu dalam pembangunan dusun. Tidak hanya dalam hal pembangunan dusun, partisipasi dan kegotong-royongan masyarakat juga terlihat dalam hal kegiatan lainnya seperti hajatan perkawinan, kegiatan perayaan hari besar agama, bantuan terhadap keluarga yang terkena musibah kematian dan lain-lain. Masyarakat di Marga Pampangan sangat memperhatikan hal tersebut, apalagi jika yang kegiatan tersebut berasal dari pihak orang yang masih punya tali persaudaraan dengannya (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Selain itu yang nampak jelas didalam Marga Pampangan adalah kehidupan sosial dalam hal pola tingkah laku terutama dalam hal pergaulan anak-anak muda apabila dibandingkan dengan pergaulan zaman sekarang itu sudah sangat berbanding terbalik. Anak-anak muda zaman sekarang seperti tidak tahu batasa-batasan dalam

pergaulan antara pria dan wanita. Sudah banyak kejadian wanita hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Perubahan sosial yang begitu cepat selain karena pengaruh modernisasi dan kemajuan zaman, ini juga diduga karena salah satu faktor pemerintahan marga yang berdasarkan atas adat telah dihapuskan (Nadjamuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

2. Dampak Terhadap Kondisi Pendidikan

Kondisi tokoh-tokoh masyarakat Marga Pampangan selama masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya, sudah melibatkan para tokoh masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing dan yang dimaksud tokoh-tokoh tersebut adalah tetua-tetua Marga Pampangan berikut:

Dimaksud dalam tokoh pendidikan disini adalah para guru, ustadz, ustadzah yang mengajar dilembaga pendidikan yang ada di desa Pampangan. Tugas dan fungsi mereka ini adalah memberikan atau mentransferkan pengetahuan yang mereka miliki kepada para generasi penerus dalam rangka membina pengetahuan dan tingkah laku mereka agar kelak dapat membangun masyarakat, agama dan bangsa dikemudian hari kelak (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Tokoh agama adalah orang yang bertugas memberi nasehat, ceramah dan siraman rohani, mengetahui kegiatan keagamaan masyarakat. Misalnya tahlilan, yasinan mengurus jenazah dan sebagainya.

Tugas ini biasanya dilakukan oleh pembuka-pembuka masyarakat yang biasanya mereka panggil kiyai, mereka ini sangat besar sekali peranannya untuk membentuk masyarakat beragama atau masyarakat yang mempunyai aqidah yang kuat. Kegiatan yang mereka lakukan biasanya memberikan pengajian-pengajian,

mengisi acara majelis ta'lim untuk membina pengetahuan agama masyarakat khususnya masyarakat desa Pampangan (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

3. Dampak Terhadap Pemerintahan

Bidang pemerintahan yaitu tokoh yang memimpin Marga Pampangan kemudian dipilih oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat Marga Pampangan, kepala marga dan perangkatnya.

Kepala marga dan perangkatnya ini mengurus permasalahan masyarakat di bidang hukum pemerintahan, misalnya menyelesaikan perselisihan antara anggota masyarakat, memberi penyuluhan tentang hukum dan sebagainya.

Tiga komponen di atas semuanya harus bersatu, patut kita syukuri bahwasannya ketiga komponen-komponen tersebut dapat bekerjasama saling menunjang satu sama lain. Jadi pemerintahan tokoh akan mendukung segala kegiatan agama dan pendidikan yang ada di marga demi mencapai tujuan hidup bermasyarakat. Begitu juga sebaliknya, agama dan pendidikan memberi distribusi kepada pemerintah demi berjalannya roda kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera, baik didunia maupun di akhirat kelak. Itu semua tidak akan tercapai tanpa adanya akidah yang mantap, yang tidak mudah tergoyahkan oleh segala terapan.

4. Dampak Terhadap Agama

Pemerintah tanpa adanya aqidah persatuan yang kuat dan keimanan akan hancur, sebab aqidah adalah landasan bagi terciptanya akhlak mulia dan akhlak mulia merupakan sarana yang paling mendasar untuk pembangunan suatu masyarakat, agama dan bangsa. Adapun pusat kegiatan keagamaan dan kepribadian di Marga

Pampangan ini telah didirikan masjid sebanyak 3 buah. Masjid ini sebagai tempat peribadatan. Selain itu juga terdapat mushola/langgar sebanyak 3 buah. Masjid dan langgar ini digunakan masyarakat Marga Pampangan untuk acara-acara hari besar agama Islam Selain tempat peribadatan juga digunakan sebagai tempat pengajian dan tempat pengajian TK/TPA Al Qur'an (Syahbuddin, *wawancara*, 20 Maret 2014).

5. Dampak terhadap Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat Marga Pampangan pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kalajaya berdasarhan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Pampangan yaitu pemerintahan Marga Pampangan mengadakan ronda setiap malam yang dilakukian oleh 2 orang hansip dan 3 orang dari masyarakat Marga Pampangan yang dilakukan dengan cara bergilir setiap malamnya, pekerjaan mereka pada saat ronda ini dengan cara berkeliling dusun setiap 2 jam sekali selama satu malam sampai pajar menjelang. Ketertiban di Marga Pampangan yaitu dengan adanya beberapa hansip cukup memberikan keaman bagi masyarakat Marga Pampangan tugas dari hansip ini apabila ada kegiatan-kegiatan pertemuan antar kepala marga, acara-acara hari besar agama Islam dan setiap kalangan atau pasar di Marga Pampangan, tugas mereka mengamankan jalannya acara tersebut (Tuti, *wawancara*, 20 Maret 2014).

6. Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi

Perekonomian penghidupan masyarakat Marga Pampangan pada umumnya bergantung pada Perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan dan perindustrian. Pada sektor pertanian yaitu penanaman padi selain itu masyarakat Pampangan juga ada yang beternak hewan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, ayam dan lain sebagainya.

Namun penghasilan utama Marga Pampangan yaitu dengan cara berdagang pada masa pemerintahan marga warga Pampangan biasa berdagang dengan menggunakan perahu kajang mereka menjual berbagai bahan keperluan dapur hasil panen kebunnya hal ini dikarenakan wilayah Pampangan dikelilingi sungai yang mengelilingi wilayah Pampangan. Penghasilan utama masyarakat Marga Pampangan yaitu dengan berdagang dan beternak hewan (Yusuf, *wawancara*, 20 Maret 2014).

Perdagangan dianggap sangat penting bagi ekonomi pedesaan yang berhubungan dengan masyarakat yang tinggal dipedalaman. Bahkan, oleh Van Leur digambarkan bahwa sebagian besar masyarakat adalah “penjaja” yaitu terdiri dari petani dan nelayan. Perdagangan yang dilakukan petani dan nelayan mampu menghubungkan antara desa dan kota. Mereka membelanjakan produk pertaniannya di pasar sebagai pusat perdagangan. Pasar biasanya terletak dipinggir sungai, karena dapat dengan mudah dikunjungi oleh para penjual maupun pembeli. Sebagian besar pengunjung pasar adalah perempuan-perempuan dengan menjajakan barang-barang yang berskala kecil.

Kelebihan pasar di tepi sungai, yaitu barang-barang yang dijual masih segar, seperti ikan basah, sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain. Banyak para pedagang melakukan perjalanan kedaerah hulu untuk membeli sekaligus barang konsumsi sehari-hari, seperti beras, buah-buahan, kopi dan lain-lain. Namun demikian barang-barang dagangan itu dibeli para tengkulak untuk dibawa kepelabuhan sebagai bahan komoditi ekspor. Oleh sebab itu para pedagang yang beroperasi disekitar pelabuhan dan pinggiran sungai dapat digolongkan menjadi 3 yaitu pertama, pedagang besar yang melakukan kegiatan disekitar pelabuhan dan bahkan melakukan pelayaran jarak

jauh, kedua: pedagang yang membeli barang-barang dari pedalaman untuk dibawa ke kota atau pelabuhan, ketiga: pedagang yang hanya berdagang dipasar ditepian sungai dan tidak mau membawa barang kepusat kota (Supriyanto. 2013:97).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah terbentuknya Marga Pampangan bermula dipelopori oleh Depati Piden tahun 1890-1910, sebagai respon atas aspirasi masyarakat di 11 desa dalam wilayah Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pembentukan Marga Pampangan di dorong oleh semangat bertambahnya penduduk di wilayah Pampangan sehingga di rasa membentuk identitas sebagai wilayah masyarakat yang otonomi dengan adat istiadatnya yang unik dan khas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Sistem pelaksanaan pemerintah Marga Pampangan dilaksanakan pada kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya tahun 1926-1969, didasarkan kepada Undang-Undang Simbur Cahaya, secara structural adalah sebagai berikut Dewan Marga sebagai pasirah pemegang keputusan tertinggi (legislatif), depati sebagai kepala marga (eksekutif), pembarap sebagai kepala desa ibu kota marga, krio-krio atau kepala desa disebut penggawa sebagai kepala desa, dibawah pasirah terdapat khatib yang mengurus bidang agama, di desa dan dipegang oleh penghulu, penduduk di jalankan secara otonomi yang dibangun dari dana khas marga yang diperoleh dari pendapatan asli marga.

3. Kendala-kendala pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya di Marga Pampangan diantara berikut: sumber daya manusia, kendala dalam bidang politik (kesadaran tentang hak dan kewajiban) dan administrasi pemerintahan, kendala dalam soal pengelolaan keuangan, kendala berupa psikologi masyarakat dan kendala dalam penentuan batas-batas tanah Marga Pampangan kemudian Dampak kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya di Marga Pampangan telah mendorong kemajuan dalam beberapa bidang baik bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, budaya maupun agama yang dapat meningkat dalam bidang pendidikan meningkatnya sarana sekolah, bidang ekonomi meningkatnya pendapatan masyarakat dalam bidang pertanian dan perikanan, bidang agama dengan bertambahnya mushola meningkatkan kegiatan beribadah serta bidang sosial budaya masrakat yang masih berpegang teguh pada aturan adat Marga Pampangan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran yaitu sebagai berikut: Kepada mahasiswa agar dapat memahami bagaimana tentang sejarah Marga, kekuasaan Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem pemerintahan marga sangat minim dan hanya satu-satunya di Indonesia. Kepada program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang agar dapat menambah bahan dan melengkapi bahan bacaan yang berbentuk sejarah, kepada pemerintah kendaknya segera membuat kebijakan untuk menyelamatkan asset-aset yang berharga dengan melestarikan budaya daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah: pt logos wacana ilmu*.
- Atar, Semi. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Berlian, Saudi. 2003. *Ogan Komering Ilir Dalam Lintas Sejarah*. Palembang Pemerintahan Kabupaten OKI.
- Berlian, Saudi. 2000. *Pengelolaan Tradisional Gander Telah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Jakarta: PT. Dyatama Milenia.
- Berlian, Saudi. 2003. *Mengenal Seni Budaya Ogan Komering Ilir*, Palembang: Pemerintahan Kabupaten OKI.
- Dapartemen pendidikan dan kebudayaan. 1994. *Undang – Undang Simbur Cahaya*. Jakarta.
- Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : APLLO.
- Depdikbud. 1991. *Pola Penguasa Pemilik Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Palembang.
- Hanafiah, Djohan dan A.W. Widjaja. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Didalam Sumatera Selatan*. Pemda Tk 1 Sumatera Selatan.
- Hugiono, dan P.K. Poerwanto. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. A. Alamsyah. 1987. *Undang-Undang Simbur Tjahaja*, cetakan ulang.
- Ismail, M. Arlan. 2004. *Marga di bumi Sriwijaya*. Palembang : Unanti press Palembang.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lastri. 2008. *Perkembangan Kecamatan Pangkalan Lampam Dari Sistem Pemerintahan Marga Kesistem Pemerintahan Desa Tahun 1974-1984 (Suatu Tinjauan Historis)*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi tidak Diterbitkan.

Nadjammudin, Ahmad. 2013. *Arsip Pampangan*

Profil Kecamatan Pampangan, 2013.

Profil Desa Pampangan, 2013.

Poerwadarmita. 1976. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Rasyid, Alfabri dkk. 2010. *Sumatera Selatan suatu tinjauan Geo-Historis dan Sosio Antropologis*. Suamtra Selatan : hak cipta dilindungi undang-undang

Soemarsono. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Sumatera Selatan*. Palembang.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUD 1945 DAN Amandemennya. Solo : Sendang Ilmu.

Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Depati Nangning Kamalajaya



Sumber: (Dokumen : 20 Maret 2014)

Gambar 2. Depati Nangning bersama Keluarga



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2013)

Gambar 3. Depati Nangning Bersama Para Depati di Sumatera Selatan.



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2014)

Gambar 4. Medali Depati Nangning Kamalajaya



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2014)

Gambar 5. Rumah Depati Nangning Kamalajaya



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2014)

Gambar 6. Kantor Marga Pampangan



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2014)

Gambar 7. Mushola Bangunan Depati Nangning Kamalajaya



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2014)

Gambar 8. Sekolah Rakyat Marga Pampangan



Sumber: (Dokumentasi: 20 Maret 2014)

GAMBAR 9
NARASUMBER 1

Nama : Ahmad Nadjamuddin
Umur : 76 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pampangan



Sumber: (Dokumentasi: 20 Maret 2014)

GAMBAR 10
NARASUMBER 2

Nama : Syahbudi
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Pampangan



Sumber: (Dokumentasi : 20 Maret 2014)

GAMBAR 11
NARASUMBER 3

Nama : Yusuf
Umur : 51
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Pulau Betung



Sumber: (Dokumentasi: 20 Maret 2014)

GAMBAR 12
NARASUMBER 4

Nama : Perdi S.Pd

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat: Desa Pampangan



Sumber: (Dokumentasi: 20 Maret 2014)

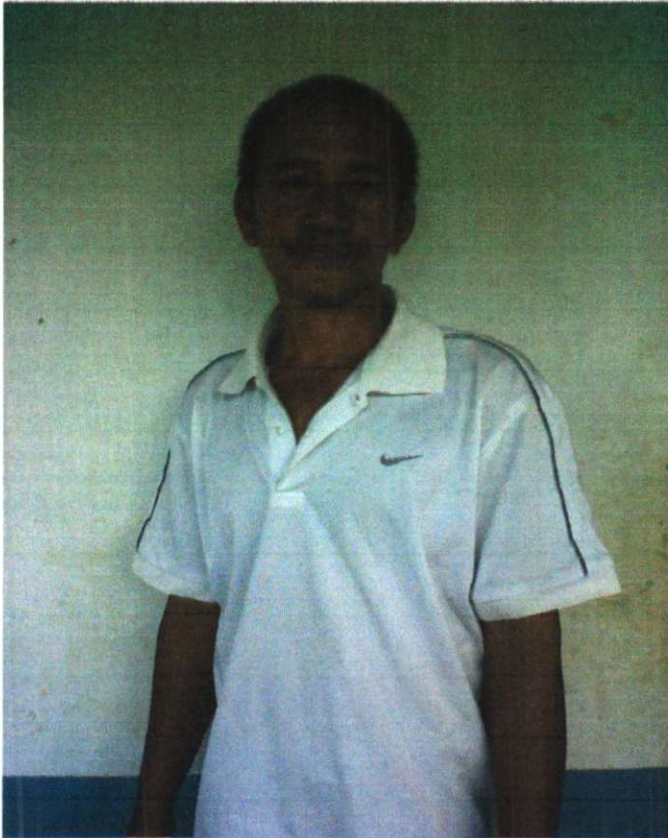
GAMBAR 13
NARASUMBER 5

Nama : Sarbini

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat: Desa Pulau Betung



Sumber: (Dokumentasi 20 Maret 2014)

GAMBAR 14
NARASUMBER 6

Nama : Tuti
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pulau Betung



Sumber: (Dokumentasi: 20 Maret 2014)

GAMBAR 15
NARASUMBER 7

Nama : Mukti

Umur : 85 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat: Desa Pulau Betung



Sumber: (Dokumentasi: 20 Maret 2014)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

Alamat : Jalan Jendral A.Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 510842
Fax (0711) 513078 E-mail: fkip_ump@yahoo.com

PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Delly

NIM : 35 2010 094

Jurusan : FKIP

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

Yang bersangkutan **DIPERKENANKAN** mengikuti ujian skripsi.

Mengetahui
Pembimbing I,

Drs. H. M. Alimansyur

Palembang, Mei 2014
Pembimbing II,

Alfabri Rasyid S.pd

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Heryati, S.Pd., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 510842,
 Fax (0711) 513073, E-mail: fakip_ump@ymuh.com

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 Nomor. 35.10.094/G.17.2/KPTS/FKIP UMP/X/2013

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

MEMPERHATIKAN:

Hasil Rapat Pimpinan diperluas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang tentang pembimbing penulisan skripsi

MENIMBANG:

- bahwa untuk kelancaran mahasiswa FKIP UMP dalam menyelesaikan program studinya, diperlukan pengangkatan dosen pembimbing penulisan skripsi
- bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai landasan hukumnya.

MENINGGAT:

- Piagam Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor. 036/III.SMs.79/80;
- Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- UU RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan MPT PPM Nomor. 173//KEP/I.3/C/2011, tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing penulisan skripsi mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama	NIM	Dosen Pembimbing
Delly	352010094	1. Drs. H. M. Ali Mansyur 2. Alfabri, S.Pd.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Mei 2014 dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 25 Zulkaidah 1434 H.
 1 Oktober 2013 M.

Tembusan:

- Ketua Program Studi
- Dosen Pembimbing



Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Status Disamakan / Terakreditasi

Alamat : Jalan Jend.Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telpon. 0711-510842 Fax 0711-513078 E-mail : FKIP
UMP@Yahoo.com

Usul Judul dan Pembimbing Skripsi

Nomor : 35.2010.094/G.17.2/KPTS/FKIP UMP/X/2013

Nama : Delly
NIM : 35 2010 094
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Judul Skripsi :
1. Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926 - 1969).
2. Peranan Raden Dewi Sartika Dalam Memajukan Pendidikan Bagi Kaum Perempuan Di Indonesia (1902-1964)
3. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia

KPS
11/13
11

Diusulkan judul nomor : I

Pembimbing I : Drs. H. M. Ali Mansyur

Pembimbing II : Alfabri, S.Pd.



Dibuat rangkap tiga

1. Ketua Program Studi
2. Pembimbing I
3. Pembimbing II



UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STATUS DISAMAKAN/TERAKREDITASI

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-510842
Fax. (0711) 513078, E-mail : ump@yahoo.com

Nomor : 35.10.094/G.17.2/KPTS/FKIP UMP/XI/2013
Hal : Undangan Simulasi Proposal

Yth :



Dosen Pembimbing Skripsi
FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Simulasi Proposal Penelitian Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Delly
NIM : 35 2010 094
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Judul Skripsi : Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

Dosen Pembimbing

1. Drs. H. M. Ali Mansyur → paraf ()
2. Alfabri, S. Pd. → paraf ()

Yang akan dilaksanakan pada

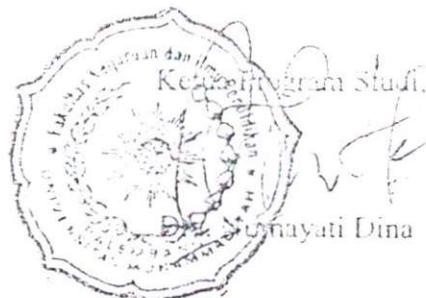
Hari, tanggal : Senin, 02 Desember 2013

Pukul : 10.00 s/d selesai

Tempat : FKIP UMP (Ruang 3.8)

Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMUPENDIDIKAN
STATUS DISAMAKAN/TERAKREDITASI**

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-510842

Fax. (0711) 513078, E-mail : ump@yahoo.com

DAFTAR HADIR SIMULASI PROPOSAL PENELITIAN

Nama : Delly
 NIM : 35 2010 094
 Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Judul Skripsi : Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

Dosen Pembimbing :
 1. Drs. H. M. Alimansyur
 2. Alfabri, S.pd.

Hari, tanggal : Senin 2 Desember 2013

Pukul : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : FKIP UMP (Ruang 2.5)

NO	NAMA	NIM	PARAF
1	Dinni Mentari	352010113	
2	FERI ANGGRIAWAN	352010006	
3	Ratih Fitri	352010077	
4	RIZKY DESIANA PUTI	352010092	
5	SPI HAMDYANI	352010076	
6	Lista Marleni	352010086	
7	Guryani	352010016	
8	Juniza Triana	352010087	
9	Datta Wardhana	352010088	
10	Rani Karoqiba	352010128	
11	FERLIN WILSON	352010112	
12	Kmt. Febrianaqib	352010111	
13	Rahmad Furnia Sakti	352010145	
14	STAPIS SUTRIANE	352010151	
15	Tina Agustini	352010100	
16	Kamsiah Juwairiah	352010035	
17	BITI HASANAH	352010037	
18	SARTINI	352010018	
19	Asul Limba Jastira	352010153	
20	REUKI RAMA DELVI	352010090	
21	RAMADHONA.M	352010064	
22	KHORIL Aei Senengaki	352010053	
23	Epa Efii Yanji	352010072	
24	Sarina	352010085	
25	Oktaria rtan ps	352010089	

Palembang, November 2013
 Ketua Program Studi

 Nurhayati Dina

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal : Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan
Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)

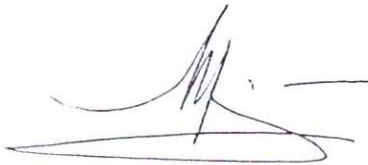
Nama Mahasiswa : Delly

Nim : 352010094

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyetujui

Pembimbing I

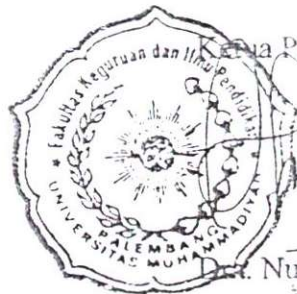


Drs. H. M. Alimansyur

Pembimbing II



Alfabri, S.Pd



Ketua Program Studi

Drs. Nurhayati Dina

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LAPORAN KEMAJUAN
BIMBINGAN SKRIPSI












Nama : Delly

NIM : 352010094

Judul : Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

Dosen Pembimbing

: 1. Drs. H. M. Alimansyur

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Catatan/Komentar	Paraf & Tgl. Konsultasi	Tanggal Selesai
1	Usulan Judul	ACC NO 1		28 November 2014
2	Proposal	Lanjut proposal Perbaikan		02 Desember 2014
3	Proposal	Perbaikan		21 Desember 2014
4	Proposal	Lanjut bab berikutnya 1, 2, 3.		25 Maret 2014
5	Bab 1, 2, 3.	Perbaikan		07 April 2014
6	Bab 1, 2, 3.	ACC		20 April 2014
7	Bab 4, 5, 6.	Perbaikan		25 April 2014
8	Bab 4, 5, 6.	ACC		27 April 2014
9	Abstrak Daftar isi dll	ACC		01 Mei 2014

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**LAPORAN KEMAJUAN
BIMBINGAN SKRIPSI**










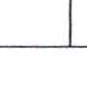
Nama : Delly

NIM : 352010094

Judul : Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969).

Dosen Pembimbing : 2. Alfabri Rasyid S.Pd

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Catatan/Komentar	Paraf & Tgl. Konsultasi	Tanggal Selesai
1	Usulan Judul	ACC		08 November 2014
2	Proposal	Ujian Proposal		02 Desember 2014
	Proposal	Sumber kutipan, Marjin		03 Desember 2014
3		Paragraf Perhatikan huruf besar dan kecil pada kalimat		
		Marjin 3433		
4	Bab 1	Perbaikan rumusan masalah		26 Maret 2014
		Perbaikan cara pengetikan		
5	Bab 1	Sumber dan beri komentar pada akhir paragraf		28 Maret 2014
		Pada latar belakang istilah tentang sistem pemerintahan Marga di Sumatera Selatan		
6	Bab 1	Perbaikan		19 April 2014
7	Bab 1	ACC		23 April 2014
8	Bab 1	ACC		26 April 2014
	Bab 2	Penomoran Halaman ditambah		
9		Tambahkan satu masalah pada kondisi geografis		01 Mei 2014
	Bab 2	ACC		03 Mei 2014
10	Bab 2	ACC		03 Mei 2014
	Bab 3	Daftar pustaka		
11		Dokumentasi Redaksi		07 Mei 2014

12	Bab 3	Perbaikan		08 Mei 2014
13	Bab 3	ACC		09 Mei 2014
14	Bab 4	Sub judul		10 Mei 2014
15	Bab 4	Perbaikan		14 Mei 2014
16	Bab 4	ACC		16 Mei 2014
17	Bab 5	Poin-poin dan Tambahkan sumber		20 Mei 2014
18	Bab 5	Perbaikan		22 Mei 2014
19	Bab 5	ACC		23 Mei 2014
20	Bab 6 Abstrak, Daftar isi, dll	perbaikan		36 Mei 2014
21	Bab 6 Abstrak Daftar isi, dll	ACC		28 Mei 2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telepon 510842

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2830/G.17.3/FKIP UMP/XII/2013
Hal : **Permohonan Riset**

8 Shafar 1435 H.
11 Desember 2013 M.

Yth. Kepala Desa Pampangan
Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Assalamualaikum w.w.,

Kami mohon kesediaan Saudara memberikan bantuan kepada mahasiswa:

Nama : Delly
NIM : 352010094
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Untuk melakukan riset di lingkungan Desa Pampangan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "*Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926—1969)*".

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah



Nasalam
Dekan,

Drs. Syaifuldin, M.Pd.
NBM/NIDN : 354917/001056201



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN PAMPANGAN
DESA PAMPANGAN

Alamat Dusun I Desa Pampangan Kec. Pampangan Kab. Ogan Komering Ilir Kode Pos 30654

Nomor : 691 /Ds.Ppg/2014
Hal : Penerimaan Riset

4 Sya'ban 1435 H
3 Juni 2014 M

Yth. Drs. Syaifudin, M.Pd
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Kami telah mengizinkan kepada mahasiswa :

Nama : **Delly**
NIM : 352010094
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Untuk melakukan riset dilingkungan Desa Pampangan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "**Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)**".

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr.wb



Pampangan, 03 Juni 2014
Pjs. Kepala Desa Pampangan,

Nurul Azma
NURUL AZMA, SH

**SURAT KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENULISAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delly

Nim : 352010094

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Skripsi yang telah saya buat ini benar-benar buatan saya pekerjaan saya sendiri (Bukan Barang Jiplakan).**
- 2. Apabila dikemudian hari terbukti/atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya akan menanggung semua resiko sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

Dengan demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, Juni 2014

Yang menerangkan

Mahasiswa yang bersangkutan,



Delly

RIWAYAT HIDUP

Delly dilahirkan di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 Desember 1992, anak keempat dari lima bersaudara, pasangan Bapak Dani dan Ibu Sumarni. Tamat SD tahun 2004, SMP tahun 2007, dan SMA 2010.

Pendidikan berikutnya ditempuh di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah hingga selesai pada tahun 2014. Penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 13 Palembang dan Kulya Kerja Nyata (KKN) Tematik POSDAYA Angkatan ke-VI di Desa Muara Emburung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Pada bulan November sampai Juni Penulis menyusun Skripsi dengan judul, *“Eksistensi Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)”*.